

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

# KOMINFO next

Edisi 12

Desember 2019



9 772655 993006

# KALEIDOSKOP 2019

**Pengarah**  
Menteri Komunikasi  
dan Informatika RI

**Pembina**  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian  
Komunikasi dan  
Informatika RI

**Penanggung Jawab &  
Pemimpin Redaksi**  
Ferdinandus Setu

**Redaktur  
Pelaksana**  
M. Taufiq Hidayat

**Redaktur**  
Frans Bambang Irawan,  
Daoni Diani Hutabarat,  
Verawati, Helmi Fajar  
Andrianto, Viskayanesya

**Reporter**  
Patricia Samantha  
Silalahi, Annisa  
Bonita P., Yusuf,  
Tommy Tirtawiguna

**Fotografer**  
Agus Yudi Harsono,  
Doni Paulus Sumule,  
Sri Indrati Novinarsari

**Desain & Layout**  
Adesta Winda Rizka,  
Rahma Aulia Indroputri,  
Lamdza Rahmattunnisa

**Produksi & Sirkulasi**  
Fahmie Trihatin Januarsyah

# KEMENTERIAN KOMUNIKASI YANG LEMBUT DAN HAKIKI

Apakah ada yang merasakan bahwa akhir-akhir ini kita justru sulit berkomunikasi secara hakiki di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi?

Pada masa lalu, salah satu kata atau ucapan, bahkan satu kalimat, dalam tutur kata kita, orang akan cenderung memaklumi, masih permisif. Sekarang ini, begitu kita salah ucap, hujatan tujuh hari tujuh malam siap menanti di ruang pemberitaan media ataupun media sosial. Apalagi setelah kedatangan bahwa sang terdakwa salah ucap adalah “lawan” atau “kubu sebelah”, maka hujatan akan dibumbui dengan ujaran kebencian dan berita bohong, agar dapat semakin memojokkan.

Seakan-akan orang-orang memelototkan mata seharian penuh untuk menemukan salah ucap atau salah pengertian dari orang atau tokoh yang sudah diincarnya. Entah disebabkan karena afiliasi sosial-politiknya, atau memang mata pencahariannya dari modus seperti itu, atau juga memang karena hatinya sudah menyimpan bara kebencian.

Suatu ketika Mother Teresa memandikan anak-anak gelandangan di tepi Sungai Gangga, Beliau melihat ada keluarga yang sedang bertengkar dan saling berteriak. Mother Teresa berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya: “Kenapa orang suka saling berteriak kalau sedang marah?” tanya Mother Teresa.

Salah satu muridnya menjawab: “Karena kehilangan kesabaran, sehingga kita berteriak.”

“Tetapi, kenapa harus berteriak pada orang yang ada di sebelahmu? Bukankah pesannya juga bisa sampai dengan cara yang halus?” tanya Mother Teresa.

Murid-murid saling beradu jawaban, namun tak ada satu jawaban pun yang mereka sepakati.

Akhirnya Mother Teresa menengahi seraya mengatakan: “Bila ada dua orang bermalahan, hati mereka sangat menjauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Semakin marah, semakin keras teriakan, karena jarak kedua hati itu semakin jauh.”

“Apa yang terjadi saat dua insan saling jatuh cinta?” lanjutnya. “Mereka tidak berteriak satu sama lain. Mereka berbicara lembut karena hati mereka berdekatan. Tidak ada jarak antara kedua hati”.

Setelah merenung sejenak, Mother Teresa meneruskan. “Bila mereka semakin saling mencintai, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bicara. Hanya berbisikan dan saling mendekat dalam kasih-sayang. Akhirnya mereka bahkan tidak perlu lagi berbisikan. Mereka cukup saling memandang. Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi.”

Mother Teresa memandang murid-muridnya dan mengingatkan dengan lembut: “Jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita biarkan, suatu hari jaraknya tidak lagi bisa ditempuh.”

Sampai saat ini bangsa yang kita cintai bersama ini juga masih saling berteriak. Artinya hati kita semua masih saling berjauhan, dipisahkan oleh kebencian. Kita sangat **berharap** agar tahun 2019 ini menjadi akhir dari percakapan yang penuh teriakan, berganti dengan bisikan penuh kelembutan karena tak ada lagi ruang bagi kebencian.

Hebatnya, satu-satunya lembaga formal yang ditugasi untuk mendekatkan hati anak-anak bangsa dan melembutkan volume suara percakapan negeri ini adalah: Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, itu adalah tugas kita. Tugas luhur untuk membangun jagad komunikasi dan informasi yang hakiki, masuk ke dalam relung terjauh hati.

Kebetulan di ujung tahun ini, teman-teman kristiani akan merayakan Natal. Bagi saya yang juga mengimaninya, manifestasi akan ajaran Tuhan untuk berkomunikasi secara hakiki. Kelahiran Yesus Kristus adalah teladan paripurna akan cara Allah berkomunikasi. Allah masuk ke dunia manusia dan memberikan yang terbaik dari-Nya. Firman Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita (Yoh 1:14).

Mendengar warta kelahiran Yesus Kristus, malaikat pun bernyanyi “Gloria in Excelsis Deo” atau “kemuliaan bagi Allah di tempat tertinggi”. Kita pun, tanpa memandang latar belakang iman, bertugas untuk mengomunikasikan informasi kebenaran secara lebih hakiki, demi untuk memuliakan Tuhan Yang Mahatinggi, dan mewujudkan kedamaian di bumi.

Semoga kita bisa membawa semangat seperti ini pada tahun baru yang akan segera kita jelang. Selamat Natal 2019 bagi teman-teman yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2020 bagi seluruh jajaran karyawan Kominfo.\*\*\*

**Johnny G. Plate**  
Menteri Komunikasi  
dan Informatika RI





Redaksi KominfoNEXT menerima artikel dalam bentuk **opini, liputan, atau tulisan ringan** lainnya sesuai dengan rubrikasi dalam KominfoNEXT. Naskah maksimal 2 halaman A4 spasi 1,5 dikirimkan melai

[majalahkominfonext@kominfo.go.id](mailto:majalahkominfonext@kominfo.go.id)

dengan subject: **Naskah Kominfo Next**. Bagi Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku di tahun berjalan.



# TABLE OF CONTENT

**01** .....  
PERSPEKTIF  
MENTERI

**04** .....  
SURAT  
DARI  
MMB9

**06** .....  
TEKNOLOGI  
& GADGET

**08** .....  
RAK  
BUKU

**09** .....  
KOMEVENT

**12** .....  
RESENSI  
BUKU

**24** .....  
TOKOH  
KOMINFO

**36** .....  
LIPUTAN UTAMA:  
WARGANET  
MEMOTRET KINERJA  
KOMINFO 2019

**40** .....  
LIPUTAN UTAMA:  
KOMINFO NGAPAIN  
AJA?

# PERSEPSI PUBLIK

Inovasi atau mati. Slogan ini terasa *cliché* karena sering digunakan oleh banyak orang untuk menegaskan bahwa jika ingin tetap “hidup”, kita harus melakukan inovasi. Kami di Biro Humas selalu berusaha mencoba melakukan hal baru untuk meningkatkan persepsi publik atas Kementerian Kominfo. Beragam program kami gelar. Kominfo Expo, Anugerah Jurnalistik Kominfo, Miss Lambe Hoaks, Hari Belanja Buku, Majalah Kominfo Next, Tok Tok Kominfo, Kominfo Cinta Buku untuk menyebut beberapa di antaranya.

Tidak berhenti di situ, kami juga ingin memotret persepsi publik melalui *survey*. Kami tidak melakukan sendiri. Kami menggandeng MarkPlus, Inc. Survei pun dilakukan di 13 kota di tanah air dengan jumlah responden 500 orang. Hasil *survey* antara lain menunjukkan bahwa 87,3 persen responden mengetahui keberadaan Kementerian Kominfo. Ini tentu belum menggembirakan, karena sebagai insitusi negara seharusnya Kementerian Kominfo diketahui keberadaannya oleh 100 persen responden.

Hasil *survey* juga menunjukkan sebanyak 31 persen responden yang mengasosiasikan Kemkominfo dengan urusan internet, 24 persen mengasosiasikan dengan media, sisanya beragam mulai dari informasi, komunikasi, media sosial, teknologi, kemunikasi dan televisi.

Sebanyak 21 persen responden yang menyebut bahwa tugas Kementerian Kominfo adalah memberikan informasi kepada masyarakat, 18 persen

yang menjawab tugas Kominfo adalah membangun infrastruktur jaringan internet hingga pelosok desa, 17 persen menjawab tugas Kominfo adalah menyaring konten internet.

Dari seluruh program dan kegiatan Kominfo, yang paling banyak diketahui oleh responden adalah UU ITE, yakni sebanyak 45,7 persen. Disusul program Aduan Konten di angka 28,5 persen. Palapa Ring mendapat tempat 7 persen. Yang menarik adalah mengapa publik mengetahui ikhwal UU ITE karena regulasi tersebut berkaitan dengan aktivitas di media sosial. Sebanyak 34,6 persen mencari tahu aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik agar tidak terjerat hukum.

Kementerian Kominfo memiliki seluruh kanal di media sosial dengan jumlah *follower* yang cukup tinggi. Akun twitter @Kemkominfo di-*follow* lebih dari 900 ribu, akun IG @kemenkominfo di-*follow* lebih dari 650 ribu. Namun demikian, dari hasil *survey* ternyata berita di TV-lah menjadi media bagi responden untuk mengenal Kementerian Kominfo. Sebanyak 22,8 persen mendengar soal Kemkominfo dari berita TV, disusul medsos Facebook 21,2 persen dan berita online di angka 21 persen. Hanya 17,2 persen yang mengakses portal kominfo.go.id, website resmi kementerian Kominfo.

Hasil *survey* publik atas Kementerian Kominfo di tahun 2019 ini kami ketengahkan di hadapan pembaca KominfoNext di edisi akhir tahun ini. Seluruh hasil *survey* ini akan kami gunakan untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam membangun citra dan persepsi publik atas kementerian Kominfo di tahun-tahun mendatang.

Oh ya, sebagai bagian dari inovasi, majalah Kominfo Next edisi ini dapat dibaca dari 2 cover: cover depan dengan topik utama Survei Publik 2019, dan cover belakang dengan topik Kaleidoskop Kominfo 2019.

*Selamat Membaca*

Ferdinandus Setu  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV



IN

# KOMINFO

*we trust*

KUNJUNGI KAMI DI:

 @KEMKOMINFO

 KEMKOMINFO

 @KEMENKOMINFO

 KEMKOMINFO TV

ATAU LANGSUNG  
SCAN QR-NYA



ON GOING:

 **Lambe Hoaks**

2X DALAM  
SEMINGGU  
SENIN & KAMIS

SETIAP AKHIR  
BULAN





1X DALAM  
SEMINGGU

**#KOMINFOPEDIA**

2X DALAM SEBULAN

  
ID : kemkominfo

SETIAP HARI

COMING SOON:

- KOMINFOHITS!
- VIRAL POSITIF
- KAMERA KOMINFO
- TAMU KOMINFO



# Alat Transportasi Bebas Polusi

Kondisi Bumi, planet tempat kita hidup dan beraktivitas sudah jauh berbeda dengan kondisi beberapa dasawarsa lalu. Salah satu yang paling sering kita rasakan yaitu kualitas udara yang setiap saat kita hirup. Berdasarkan data dari Airvisual.com pada Bulan Juli 2019, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara paling tidak sehat di dunia. Kualitas udara pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 08.00 tercatat memiliki US Air Quality Index (AQI) sebesar 196, jauh lebih besar dari kota-kota lain di dunia.

Pemerintah melalui Pemda DKI Jakarta langsung bertindak dengan menyiapkan 14 rencana aksi yang tercantum dalam peta jalan bertajuk “Jakarta Cleaner Air 2030”. Melalui program ini juga, pemerintah mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan udara bersih dengan menggiatkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Zaman *now*, banyak pilihan bagi masyarakat untuk bisa menggunakan kendaraan ramah lingkungan dipadu dengan teknologi super keren yang menyertainya.

## 1 E- Bike

Sepeda sudah dikenal masyarakat sejak era kolonialisme di Nusantara. Oleh karena itu, moda satu ini sudah sangat familiar dengan keluarga di Indonesia. Hadirnya sepeda lipat secara luas di era 2000-an menjadikannya sebagai alternatif kendaraan bagi kaum urban perkotaan.

Sepeda tidak lepas dari dampak perkembangan teknologi transportasi. Beberapa produsen sepeda berlomba-lomba mengembangkan sepeda berteknologi, salah satunya pada genre sepeda listrik alias *e-bike*. *E-bike* biasanya bekerja dengan *pedal assist* ataupun *hand throttle*. Di kalangan pesepeda, *hand throttle* kurang diminati karena lebih mirip ke sepeda motor dibanding sepeda itu sendiri.

Polygon Path-E menjadi salah satu produsen sepeda lokal yang menyediakan opsi sepeda dengan dilengkapi baterai lithium-ion dengan metode *electric pedal assist*. *Pedal assist* ini akan berhenti ‘membantu’ pesepeda ketika kecepatan sudah mencapai 25 km/jam. Pada saat artikel ini dibuat, sepeda Polygon Path E-5 dibanderol seharga Rp. 19.900.000,-

Source : Polygonbike.com





## 2 Skuter Listrik

Xiaomi menjadi saat satu *brand* perangkat elektronik yang saat ini agresif melakukan invansi ke produk alat transportasi *hi-tech*. Setelah meluncurkan jajaran sepeda lipat listrik, Xiaomi merambah ke moda transportasi skuter listrik.

Skuter produksi Xiaomi dengan kode M365 hadir dengan desain yang *compact* dan *stylish*. Berbahan dasar alumunium, skuter ini memiliki berat 'hanya' 12,2 kg sehingga relatif masih cukup nyaman untuk ditenteng. Dibekali motor listrik berkapasitas 250 Watt, skuter besutan Xiaomi ini diklaim bisa menempuh jarak 30 km dengan kecepatan maksimal 25 km/jam.

Buat yang hobi berkendara malam, skuter listrik ini dilengkapi lampu depan bertenaga 1.1 Watt yang bisa menerangi jalanan sepanjang 6 meter. Peralatan *safety* wajib hukumnya ya Sobatkom jika kamu mengendarai skuter ini. Di Indonesia, skuter ini dijual di Indonesia dengan harga Rp. 5.021.600,-



## 3 Mobil Listrik

Perusahaan besutan Elon Musk, Tesla menjadi pionir dalam mengembangkan *zero emission vehicle*. Merujuk dari situs resmi [www.tesla.com](http://www.tesla.com), terdapat 6 (enam) model kendaraan yang ditawarkan oleh Tesla mulai dari sedan *sport* sampai dengan *truck* dengan desainnya yang *antimainstream*. Di Indonesia sendiri, Tesla Model 3 sudah banyak beredar di jalanan tanah air. Baterai pada kendaraan ini diklaim bisa menempuh jarak 518 km untuk satu kali *charge* dengan akselerasi yang lumayan 'wah' yaitu 3.2 detik saja untuk mencapai kecepatan dari 0 ke 100 km/jam. Tidak hanya akselerasi yang 'wah', kendaraan ini juga bisa mencapai kecepatan maksimum di 260 km/jam, Jakarta-Bandung bisa kurang dari 1 jam ya Sobatkom.

Dengan performa yang tidak kalah dari mobil *sport*, mobil ini tidak menghasilkan emisi gas buang dikarenakan mesinnya yang menggunakan tenaga listrik. Bagaimana dengan performa pengisian ulang baterainya? Untuk mengisi tenaga baterai kendaraan ini, SobatKom hanya membutuhkan waktu 15 menit saja agar baterai bisa men-*supply* tenaga kendaraan untuk menempuh jarak 270 km.

Saat ini, kendaraan ini dibanderol seharga Rp. 1.5 milyar *off the road* alias belum termasuk pajak-pajak. Di negara asalnya, Amerika Serikat, kendaraan ini dijual dengan *range* harga USD 35.000 sampai USD 59.900 atau sekitar Rp. 496 juta sampai Rp. 850 juta.



## Perpustakaan Kominfo



LANTAI 1 GEDUNG B

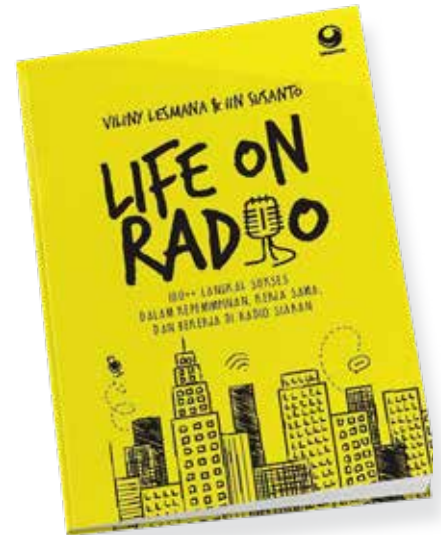
SENIN S.D JUMAT  
08.00 S.D 16.00

### **Life on Radio**

Pengarang : Viliiny Lesmana & Iin Susanto

Media radio memiliki kekuatan dalam menanamkan imajinasi dan nilai-nilai positif di benak pendengarnya karena radio adalah *'theatre of mind'*. Hal ini dapat mendorong perubahan pemikiran dan perilaku khalayaknya ke arah yang lebih baik. Dengan visi misinya, yaitu mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa, Radio Raka dan Sonora Bandung diharapkan bisa menjadi salah satu benteng pencerahan di Indonesia. Radio Raka dan Sonora Bandung memiliki ciri khas masing-masing. Semua program FIF GROUP baik *off air* maupun *on air* selalu terakomodasi dan berjalan dengan baik. Ide-ide apa pun yang disampaikan ke tim Raka FM dan Sonora Bandung tereksekusi dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Buku Life on Radio ini berisikan tentang 100++ langkah sukses dalam kepemimpinan, kerja sama, dan bekerja di radio siaran.



### **Yuk Jadi Youtuber**

Pengarang : Jefferly Helianthusnfrfi

Yuk Jadi YouTuber adalah buku yang siap memandumu untuk menjadi YouTuber. Buku ini menjelaskan langkah demi langkah dalam menjadi YouTuber. Ditulis untuk kamu yang ingin memulai berkarya sebagai YouTuber. Menjadi YouTuber dapat menjadi kegiatan yang asyik. Kamu dapat melakukan hobi, menjadi produktif, hingga tentunya dikenal luas. Buku berisi inspirasi dan tutorial langkah demi langkah untuk membantumu menjadi seorang YouTuber.



### **Love Without Words**

Pengarang : Dheyamela

Buku ini menceritakan tentang sosok remaja jail, badung, dan sering berbuat onar bernama Kevin Andreas berubah 180 derajat ketika jatuh cinta kepada seorang gadis "putri salju" disekolah baru. Namun, gadis cantik itu tidak ingin berbicara sama sekali, seolah bisu. Tak hanya itu gadis itu dianggap tak ada oleh teman-teman disekolah. Seakan-akan gadis itu adalah hantu.



### **Karakter 360 : Kecerdasan Rahasia Manusia Indonesia**

Pengarang : Erbe Santanu

sadarilah bahwa di dalam diri kita terdapat peranti lunak yang memiliki kecerdasan super melampaui komputer tercanggih manapun. peranti lunak yang dapat membawa anda dan kita semua menuju kebahagiaan sejati, sempurna dan abadi.

buku ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana peranti lunak tersebut bekerja dan pemahaman tentang hal itu menjadi dasar bagi anda untuk mentransformasi diri menjadi manusia yang sempurna (manusia berkarakter 360)





# Kominfo Cinta Buku 2019

Desember 2019, Perpustakaan Kementerian Kominfo menutup kegiatan Tahun 2019 dengan menyelenggarakan event bertajuk Kominfo Cinta Buku. Event ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Kementerian Kominfo dengan mengawinkan beberapa kegiatan sekaligus yang tentunya berhubungan dengan buku dan menulis. Ada 3 kegiatan yang dilaksanakan dalam event Kominfo Cinta Buku yang diselenggarakan secara *marathon* dari tanggal 3 – 6 Desember dan dilanjutkan tanggal 10 – 11 Desember 2019.

Pertama, Bedah Buku, yang membahas buku-buku yang erat kaitannya dengan tugas Kementerian Kominfo. Hadir dalam kegiatan ini di antaranya Agus Sudibyo, dengan bukunya yang berjudul *Jagat Digital*, serta sosok yang tidak asing bagi Sivitas Kominfo yang sekarang menjabat sebagai Bupati Magetan, Dr. Suprawoto dengan bukunya berjudul *Government Public Relation*.

Kedua, Festival Buku. Kegiatan ini menghadirkan buku-buku murah dan juga buku dengan *best prices* yang hanya ada di event Kominfo Cinta Buku. Perpustakaan

Kementerian Kominfo menggandeng 2 (dua) toko buku kenamaan yaitu Gramedia Matraman dan Millenia Bookstore untuk menyediakan buku-buku dengan harga terbaik. Bahkan, di tengah-tengah kegiatan tersebut, dilakukan kegiatan Raup Buku di mana para pengunjung yang telah berbelanja, diperbolehkan untuk bisa mengambil sepuasnya buku-buku yang telah disediakan dengan hanya menggunakan satu tangan yang tentunya gratis. Total selama 7 (tujuh) hari penyelenggaraan kegiatan ini, transaksi pembelian buku mencapai kurang lebih Rp. 150.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata minat untuk membeli buku masyarakat masih tinggi di tengah era informasi yang serba digital seperti saat ini.

Ketiga yaitu *book charity*. Pada event Kominfo Cinta Buku, Perpustakaan Kementerian Kominfo menyediakan ATM Buku sebagai tempat bagi Sivitas Kementerian Kominfo maupun masyarakat yang ingin menyumbangkan bukunya. Tahun ini terkumpul sebanyak kurang lebih 750 buku yang siap disalurkan ke perpustakaan dan taman bacaan di wilayah 3T serta daerah lain yang membutuhkan.



B

U

K



U

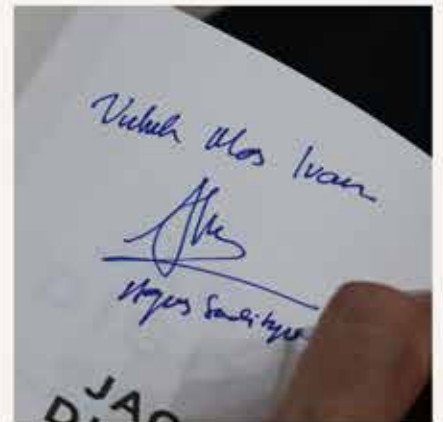


**"Setiap tempat adalah sekolah  
Setiap orang adalah guru  
Setiap buku adalah ilmu"**

— Roem Topatimasang



Kegiatan Raup Buku ini memungkinkan pengunjung mengambil sepuasnya buku-buku yang telah disediakan secara gratis.

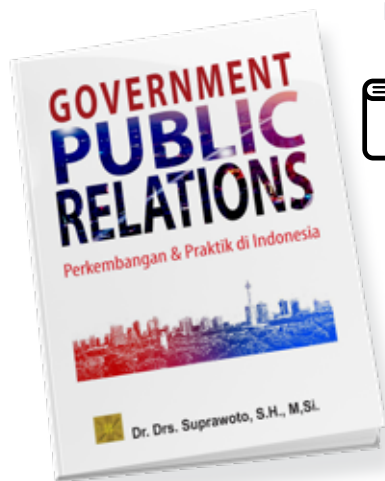


2019

# HUMAS PEMERINTAH BUKAN HUMAS PEJABAT PARTAI YANG BERKUASA

Tips dan Trik Mantan Pejabat Instansi Pemerintah  
yang Membidangi Komunikasi Publik

Oleh : Nurul Hidayah Putri  
Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik  
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik



## GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

Penulis : Suprawoto

Penerbit : Prenada Media

Tebal : 303 Halaman

Cover : Soft Cover

Humas atau Public Relations (PR) bukan lagi pekerjaan yang asing. Kehumasan dirasakan sebagai suatu strategi komunikasi yang mumpuni dalam memperoleh dukungan masyarakat yang lebih luas terhadap kinerja atau tujuan organisasi/ perusahaan. Kegiatan kehumasan tidak seperti periklanan yang hanya menasar target pasarnya. Lebih jauh, dengan kegiatan kehumasan, diharapkan masyarakat terpenuhi kebutuhan informasinya akan institusi tersebut.

Meskipun sudah banyak literatur yang membahas mengenai humas, tetapi sangat minim yang membahas topik humas pemerintah. Ceruk inilah yang disadari oleh Suprawoto, mantan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia lalu menorehkan pengalaman dan hasil penelitiannya tentang humas, khususnya humas pemerintah dalam buku yang disusun sebagai *textbook* atau buku rujukan ini.

Buku yang berjudul *Government Public Relations, Perkembangan dan Praktik di Indonesia* ini membagi pembabakan penulisannya menjadi dua belas bab, dimulai dari perkembangan humas pemerintah, prinsip dasar, sistem komunikasi di Indonesia, hingga kode etik humas pemerintah. Buku ini mengupas sejarah kehumasan pemerintah sejak era Presiden Soekarno,

hingga Presiden Jokowi dengan dibumbui pengalaman-pengalaman penulis. Sejarah kehumasan pemerintah dimulai dari janji pemerintah era Presiden Soekarno untuk mendukung kebebasan berpendapat, berkumpul, mengakses informasi, serta kebebasan pers. Kebijakan komunikasi dan penerangan yang muncul adalah menjunjung pikiran masyarakat umum (*public opinions*) sebagai sendi pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Namun setelah Belanda benar-benar pergi dari bumi Nusantara, kebebasan itu dipandang hanya sebagai alat mempertahankan *status quo* pemerintah. Bahkan pada era Soeharto, pengekangan pers juga terjadi setelah peristiwa Malari tahun 1975, yaitu melalui kewajiban pers memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Humas pemerintah, melalui Departemen Penerangan merupakan satu-satunya corong pemerintah yang harus diamini oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun pasca

reformasi, transparansi dan keterbukaan terhadap akses informasi dan kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang. Perkembangan inilah yang dianggap penulis sebagai tantangan tersendiri bagi humas pemerintah untuk bekerja lebih profesional. Tugas humas pemerintah tidak lebih ringan daripada humas swasta. Bahkan, penulis menjabarkan begitu banyak tugas humas pemerintah. Hal ini tentu bertolak belakang dari stigma Aparatur Sipil Negara yang dulu diistilahkan sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS. PNS seringkali dianggap sebagai “pegawai negeri santai”. Humas di instansi swasta tugasnya sangat spesifik dengan publik yang spesifik pula. Hal ini berbeda dengan penggambaran humas pemerintah oleh penulis. Humas pemerintah, selain bertugas sebagai humas pada umumnya, juga menyelenggarakan dan mengkoordinasikan lalu lintas arus informasi ke dalam dan ke luar. Bahkan dalam bab tentang Humas Pemerintah

## Bab 1

Perkembangan Humas Pemerintah

## Bab 2

Humas Pemerintah

## Bab 3

Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Ruang Lingkup Humas Pemerintah

## Bab 4

Prinsip Dasar Humas Pemerintah

## Bab 5

Organisasi Humas Pemerintah

## Bab 6

Publik, Stakeholder, dan Sasaran Humas Pemerintah

## Bab 7

Media Relations Humas Pemerintah

## Bab 8

Sistem Komunikasi di Indonesia

## Bab 9

Humas Pemerintah di Tengah Pusaran Politik

## Bab 10

Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi Publik

## Bab 11

Kode Etik Humas Pemerintah

## Bab 12

Penutup

di Tengah Pusaran Politik, penulis mengisahkan dilema yang muncul ketika Menteri Kominfo harus menyebarkan informasi kebijakan yang bertentangan dengan pendapat partai yang diusungnya. Oleh karena itu, penulis pernah menegaskan ketika dipercaya menjadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan, bahwa ia akan memimpin lembaga tersebut sebagai humas pemerintah daerah, bukan hanya humas pimpinan daerah.

Catatan penting yang ditegaskan oleh penulis dalam buku ini mencakup netralitas ASN yang kemudian dihadapkan dengan kewajiban humas menjadi humas yang profesional. Dalam diskusi buku di Kementerian Kominfo beberapa minggu yang lalu, penulis menambahkan bahwa ASN harus netral terhadap partai politik, namun tidak boleh netral terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana melaksanakannya? Para ASN yang bertugas di satuan kerja komunikasi publik atau kehumasan bisa belajar banyak dan berpedoman pada buku ini. Mengapa? Karena buku ini juga cukup lengkap membahas pengaturan tentang komunikasi publik/ kehumasan di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.





## Keunggulan

Penulis sangat kaya pengalaman di bidang kehumasan pemerintah, mulai sebagai Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Informasi Publik, hingga pengajar ilmu komunikasi. Hal inilah yang menjadi kunci penulis, sehingga mampu menyajikan temuan-temuan yang komprehensif tentang humas pemerintah, mulai dari nama/ nomenklatur instansi kehumasan pemerintah, hingga pengaturan-pengaturan terkait humas/ komunikasi publik di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, pembaca bisa sekaligus mempelajari bagaimana sistem komunikasi publik di tingkat pemerintah pusat, hingga daerah, dengan membaca lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, hingga ulasan singkat tentang Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

## Kelemahan

Dengan komprehensifnya pembahasan kehumasan pemerintah di buku ini, tampaknya akan semakin lengkap jika penulis menambahkan pengalaman/ hasil wawancara kepala biro humas atau komunikasi publik di instansi lainnya, baik di pemerintah pusat, maupun daerah. Ya, mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat buku GPRs edisi II ya, Pak!

## Tentang Penulis

Dr. Drs. Suprawoto, SH, MSi., merupakan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (2014 – 2016). Kariernya sebagai PNS ditutup dengan manis sebagai Widyaiswara Utama, atau pengajar PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Kini pengalaman di bidang komunikasi pemerintah mengantarkannya sebagai Bupati Magetan sejak tahun 2018. Berkaca pada pengalaman tersebut, ia tidak menuntut Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Magetan untuk melakukan pencitraan terhadap dirinya, sebagai kepala daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan-lah yang memiliki fungsi sebagai humas pemerintahan kabupaten Magetan, sekaligus menjamin hak warganya memperoleh informasi publik.

# JAGAT DIGITAL,

Ajak Masyarakat Berpikir Kritis



## JAGAT DIGITAL: PEMBEBASAN DAN PENGUASAAN

Penulis : Agus Sudibyo

Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia

Tebal : 492 Halaman

Cover : Soft Cover

50 tahun sudah sejak internet dikembangkan pertama kali oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA di tahun 1969. Selama itu pula, internet mengalami perkembangan yang pesat dan dramatis. Tidak hanya berkaitan dengan ranah teknologi, pengaruh internet menyebar secara sporadis ke setiap lini kehidupan masyarakat dari bidang ekonomi, politik, kebudayaan sampai dengan sosial kemasyarakatan.

Berbicara tentang dampak internet di sosial masyarakat, tidak terlepas dari primadona internet yaitu media sosial. Kenapa disebut primadona? Merujuk dari data yang dilansir Hootsuite wearesocial.com di Januari 2019, dari 150 juta pengguna internet di Indonesia, 150 juta merupakan pengguna aktif di media sosial. Secara sederhana, kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh pengguna internet di Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Jika kita menilik dari sudut pandang seorang marketer, angka 150 juta ini merupakan potensi pasar yang bisa digarap untuk memasarkan suatu komoditas, dari sudut pandang seorang tenaga pendidik, 150 juta ini merupakan potensi para murid yang akan menerima ilmu pengetahuan dan tentunya sudut pandang-sudut pandang lainnya. Tidak berhenti pada potensi saja, dalam pemanfaatan media sosial tersebut, baik pengguna maupun pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk bisa menyebarkan seluruh informasi dan memasarkan produk-produknya di media sosial. Luar biasa bukan??

Begitulah mungkin gambaran umum di masyarakat kita tentang media sosial. Dalam pemanfaatannya, pengguna benar-benar dimanjakan oleh jangkauan media sosial dalam menggapai khalayak serta kegratisannya untuk menyebarkan informasi-informasi atau sekedar berbagi seputar kehidupan pribadi kita, Tapi apakah benar-benar gratis? Apa yang saya pahami dengan keikhlasan dan kebaikan hati platform media sosial kepada penggunaanya berubah ketika kita diajak untuk berpikir kritis di Buku Jagat Digital karya Agus Sudibyo. Pada bab awal buku ini, kita sudah disodorkan pertanyaan yang cukup menohok tentang aktifitas yang kita lakukan di media sosial. Penulis memaparkan fakta tentang *surveillance capitalism* yang dilakukan oleh platform media sosial terhadap para penggunaanya. Kebebasan yang dimiliki pengguna media sosial ternyata tidak didapatkan secara

cuma-cuma. Kebebasan tersebut ditukar dengan data penggunaan internet yang kita lakukan. Data tersebut menjadi aset dan komoditas tersendiri bagi platform media sosial untuk mengembangkan bisnisnya.

Tidak berhenti sampai data pengguna, paparan *display* iklan tidak luput menjadi sisi komersial yang dieksploitasi oleh platform media sosial. Bahkan, penulis secara khusus membahas 2 (dua) bab tersendiri tentang betapa gurihnya bisnis iklan yang dilakukan oleh platform media sosial dengan mengambil contoh penelitian Plum Consulting di Inggris. Disampaikan dalam buku tersebut bahwa pada tahun 2017, belanja iklan digital mencapai 52% dari total keseluruhan belanja iklan di Inggris atau sebesar 22,2 miliar pound. Kemanakah uang-uang ini mengalir? Agus Sudibyo menjelaskan secara detail aktor-aktor siapa sajakah yang berperan dalam

## Bab 1

Pendahuluan

## Bab 2

Geopolitik Digitalisasi

## Bab 3

Monopoli Rantai Periklanan Digital

## Bab 4

Hubungan Timpang Penerbit dan Perusahaan Platform

## Bab 5

*The Winner-Take-All Market*

## Bab 6

*Surveillance Capitalism*

## Bab 7

*Free Online Culture*

## Bab 8

*Data as Labor*

## Bab 9

Perlindungan Data Pengguna Internet

## Bab 10

Pemilu, Media Sosial dan Kejahatan Elektoral

## Bab 11

Media Sosial Demokrasi, dan Problem Etika

## Bab 12

Rangkuman

## Bab 13

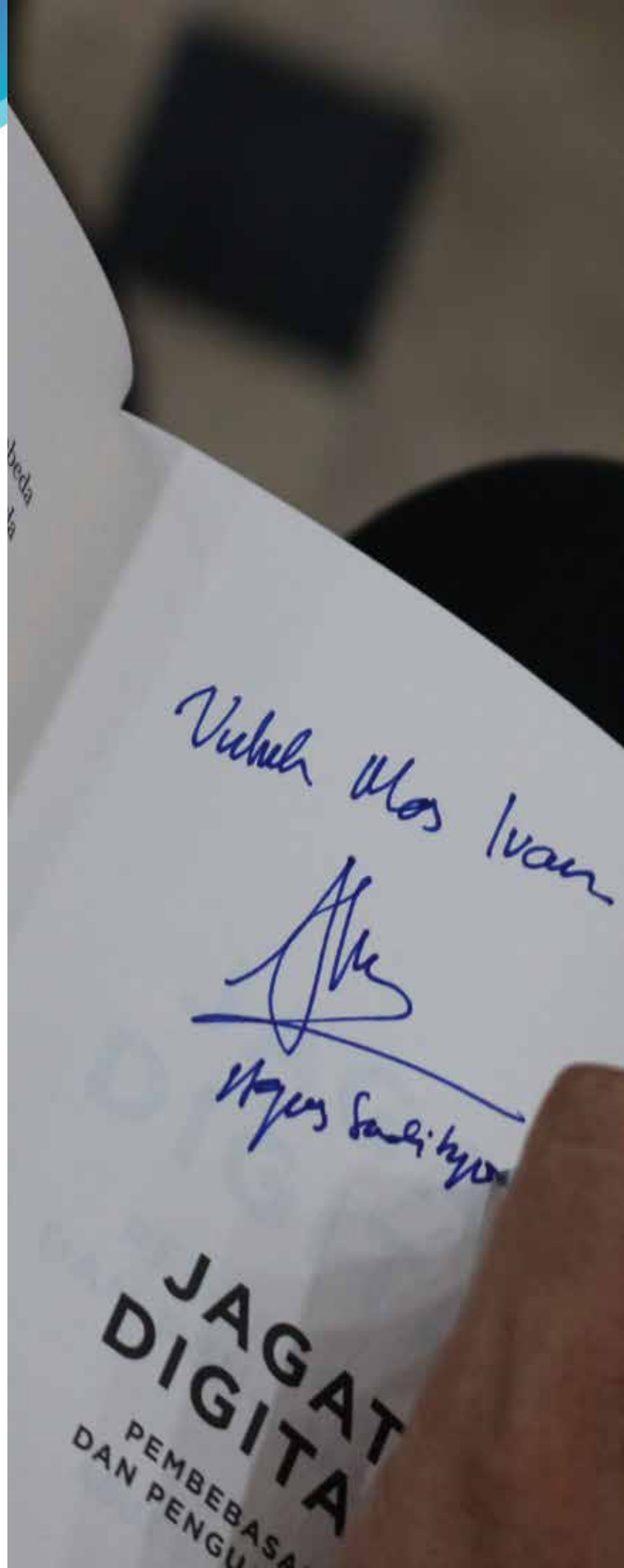
Penutup

bisnis iklan digital di Inggris yang tentunya didominasi oleh perusahaan platform media sosial itu sendiri.

Masih berbicara tentang bagaimana iklan digital tersebut berproses, buku ini memberikan gambaran kepada kita tentang sistem besar di bisnis iklan digital atau secara spesifik merujuk ke iklan programatik. Ada yang dinamakan *trading desk*, *demand side platform*, *supply side platform* sampai dengan *publisher* yang kesemuanya memiliki peran masing-masing dalam men-*deliver* suatu iklan programatik.

Pada Bab V buku ini, membahas mengenai hubungan antara media lama yang berbasis jurnalisme dengan media baru yang berbasis media sosial dan platform digital. Hubungan antara media tersebut digambarkan dengan istilah *frenemy*, *friend* sekaligus *enemy*. Ambivalensi yang hadir dalam hubungan media di jagat digital dijabarkan detail dalam buku ini dengan mengambil contoh di beberapa negara yaitu Amerika, Inggris dan Australia. Ketika media lama memboikot media baru dikarenakan menyebarkan konten-konten mereka tanpa izin, yang pada akhirnya ternyata proses penyebaran 'tanpa izin' tersebut berdampak pada peningkatan kunjungan ke situs media lama itu sendiri. Atau bagaimana dukungan media baru kepada media lama dalam bentuk iklan maupun advertorial yang secara langsung mendukung keuangan media lama. Terjadi fenomena *coopetition* diantara kedua media ini.

Selain menampilkan permasalahan, buku ini tak luput dalam memberikan solusi-solusi bagi media lama dalam menghadapi era digital. Salah satu yang dijadikan rekomendasi adalah meningkatkan jumlah pelanggan konten berita media tersebut. Untuk membaca suatu produk berita yang berkualitas, akurat dan



detail, *subscription* layak dilakukan untuk membedakan antara konten premium dengan yang biasa. Kontribusi pembaca melalui skema berlangganan ini menjadi salah satu solusi yang diambil oleh beberapa media kenamaan di Amerika dan Inggris.

*The Winner Takes All Market* – merupakan adagium yang digunakan dalam buku ini untuk menggambarkan bagaimana bisnis digital berkembang. Kecenderungan terjadinya monopoli maupun oligopoli dideskripsikan dengan berbagai kajian-kajian serta contoh-contoh nyata yang terjadi dalam bisnis digital yang sebagian besar mengambil kasus yang terjadi di *Silicon Valley*. Namun, tidak semuanya setuju dengan *The Winner Takes All Market*, tentunya dengan sudut pandang dan rujukannya masing-masing. Contoh kasus yang diberikan juga menunjukkan bahwa pernyataan ini masih perlu ditinjau ulang dan dikritisi. Buku ini menyimpulkan polemik yang berkembang tentang *The Winner Takes All Market*.



Syahdan, kurang bijak rasanya bagi saya untuk menyampaikan bagaimana buku ini menceritakan kesimpulan dari pertentangan pendapat *The Winner Takes All Market* ataupun *ending* persaingan antara media lama dan media baru kepada pembaca majalah KoinfoNEXT yang budiman. Ibarat membocorkan jalan cerita atau *spoiler* sebuah film yang ditunggu-tunggu khalayak ramai, azab pedih menanti dari warganet +62 dan para penggemar buku dunia digital. Jadi, bagi yang penasaran dengan segala cerita tentang dunia digital di buku karya Agus Sudibyo, bisa segera meluncur ke toko buku terdekat, ataupun mampir ke Perpustakaan Kementerian Koinfo untuk bisa menikmati cerita, data dan fakta yang ada di buku ini. Selamat menikmati.

# FILOSOFI TERAS

Menjawab Problematika Umat  
dan Bangsa Kontemporer



## FILSAFAT YUNANI-ROMAWI KUNO UNTUK MENTAL TANGGUH MASA KINI

Penulis : Henry Manampiring

Penerbit : Kompas Penerbit Buku

Tebal : 346 Halaman

Cover : Soft Cover

*"If you live according to what others think,  
you will never be rich." Seneca (Letters)*

Kutipan pertama ini merupakan sebuah sambutan yang hangat seperti renungan untuk mengingatkan kita yang hidup dalam era digital ini dengan banjirnya informasi melalui media sosial. Terkadang kita terlalu terbuai dan mudah percaya dengan segala informasi yang kita baca melalui media sosial, yang tanpa kita sadari hal tersebut telah mengganggu di pikiran kita.

Henry Manampiring sebagai penulis buku ini memanglah bukan alumnus Fakultas Ilmu Filsafat. Namun, buku ini yang mengajarkan ilmu filsafat Yunani-Romawi Kuno bernama filsafat Stoa dalam bahasa yang sangat ringan dan sangat *relate* dengan kehidupan generasi *zaman now* yang mudah gelisah dan cenderung suka terpancing emosi hanya dengan membaca sebuah informasi melalui dunia siber.

Dalam ilmu filsafat Stoa ini mengajarkan prinsip-prinsip stoisisme yang menunjukkan kebijaksanaan universal, jadi ilmu ini tidak terbentur dengan ilmu budaya dan agama tertetu saja. Tujuan utama dalam stoisisme ini diantaranya adalah agar hidup bebas dari emosi negatif (termasuk *baper*), hidup mengasah kebaikan seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian hingga kontrol diri. Dalam prinsip ini, kebahagiaan bukanlah tujuan utama melainkan adanya ketentraman dan kedamaian dalam hati masing-masing individu yang menerapkannya.

Selain itu, prinsip utama Stoisisme juga menekankan bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. Mengapa? Karena akhir-akhir ini banyak situasi sehari-hari yang sudah kehilangan nalar atau akal sehat walau hanya sesaat. Dalam buku ini dijelaskan juga contoh seperti apa situasi dimana manusia seperti kehilangan nalar atau akal sehatnya walau sesaat. Hal itu dicontohkan saat berlangsung pesta demokrasi yang banyak memecah belah hubungan kekeluargaan, pertemanan, hingga hubungan suami-istri karena perbedaan pandangan politik yang diungkapkan melalui media sosial masing-masing. Jadi, dalam situasi seperti ini, Filosofi Teras sangat dibutuhkan untuk menjaga rasionalitas di tengah hamparan informasi yang kita baca sehari-hari.

Dalam Bab IV yang berjudul “Dikotomi Kendali”, dijelaskan apa saja yang hal-hal dalam keseharian kita yang tidak masuk dalam kendali kita seperti opini orang lain, reputasi kita, kesehatan kita, kekayaan

kita hingga kondisi saat lahir (agama, jenis kelamin, dll). Sedangkan, hal-hal yang berada di bawah kendali kita adalah pertimbangan, opini, atau persepsi kita, keinginan kita dan pikiran kita. Stoisisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari “*things we can control*”. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam sendiri. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti yang disebutkan di atas.

“Kendali” dalam buku ini juga disebutkan bukanlah hanya soal kemampuan “memperoleh” tetapi juga “mempertahankan”. Jadi, apapun yang kita miliki seperti kekayaan, ketenaran, persahabatan dan kesehatan itu mungkin hilang karena berada di luar kendali kita dan bisa direnggut sewaktu-waktu dari kita apabila tidak dipertahankan. Sehingga, dalam Filosofi Teras diajarkan bagaimana bahwa hal-hal ini sangat tidak masuk akal untuk dijadikan patokan kebahagiaan kita.

## Bab 1

---

Survei Khawatir Nasional

## Bab 2

---

Sebuah Filosofi yang Realistis

## Bab 3

---

Hidup Selaras dengan Alam

## Bab 4

---

Dikotomi Kendali

## Bab 5

---

Mengendalikan Interpretasi dan Persepsi

## Bab 6

---

Memperkuat Mental

## Bab 7

---

Hidup di Antara Orang yang Menyebalkan

## Bab 8

---

Menghadapi Kesusahan dan Kemudahan

## Bab 9

---

Menjadi Orang Tua

## Bab 10

---

*Citizen of The World*

## Bab 11

---

Tentang Kematian

## Bab 12

---

Penutup

## Epilog

---

Mempraktikkan Filosofi Teras

Pada bab selanjutnya, dijelaskan dan digambarkan sebuah situasi yang bisa dikendalikan dari emosi negatif menjadi lebih baik. Contohnya, apabila kita terjebak dalam sebuah kemacetan, interpretasi kita seperti otomatis kita pasti berpikir seperti buang-buang waktu sehingga emosi yang keluar menjadi negatif. Sedangkan, dalam Filosofi Teras diajarkan bagaimana kita mengubah interpretasi sendiri dalam situasi yang sama. Misalnya, kita jadi bisa memanfaatkan waktu luang saat terjadi kemacetan dengan membaca buku/*e-book* atau melakukan hal lainnya di tengah kemacetan tersebut.

Buku ini juga menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil saat merasakan emosi negatif. Langkah tersebut disingkat dengan STAR yaitu *Stop* (berhenti), *Think & Assess* (dipikirkan dan dinilai) dan terakhir *Respond* (bertindak). Ilustrasi ini bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari yang dirasa sangat dibutuhkan. Contohnya, apabila kita hendak pergi ke suatu rapat tetapi ada barang yang ketinggalan, pasti rasanya ingin memarahi diri sendiri karena kecerobohan tersebut. Kalau memakai langkah STAR, kita dituntut untuk berhenti sejenak dari emosi negatif dan berusaha mengendalikannya. Selanjutnya, kita diharapkan juga bisa berpikir dan menilai apakah barang yang ketinggalan tersebut sangat penting sehingga kita perlu memarahi diri sendiri karena sifat alamiah 'lupa' yang







# THE FUTURE LEADER, ANUGERAH ASN 2019

## ARYO PAMORAGUNG: BEYOND EXPECTATION

Menjadi Tiga Terbaik The *Future leader* Anugerah ASN 2019 diakui Aryo Pamoragung adalah *beyond expectation*. “Perjalanan Anugerah ASN 2019 ini merupakan rangkaian panjang yang dimulai dari tingkat Direktorat Jenderal (SDPPI), Kementerian (Kemkominfo) hingga Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Jika diminta mengungkapkan dalam dua kata, bagi saya semua ini *beyond expectation*,” ujar Aryo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Lewat *project* yang dibawakannya “Penataan Ulang (Refarming) Pita Frekuensi Seluler untuk Internet Berkecepatan Tinggi hingga Pelosok”, Aryo berhasil menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Berprestasi Tingkat Direktorat Jenderal, ASN berprestasi Kementerian Kominfo hingga menjadi The *Future leader* Anugerah ASN 2019 Kementerian PANRB.

Jika menilik ke belakang, Aryo bercerita bahwa semua ini diawali saat dirinya masuk

menjadi ASN berprestasi Tingkat Ditjen SDPPI secara tidak sengaja. “Awalnya saya hanya sebagai *stuntman* saja, karena wakil direktorat yang diusulkan saat itu gagal, jadi satu hari menjelang penutupan seleksi, atasan meminta saya untuk maju mewakili Direktorat Penataan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, akhirnya saya masuk 3 besar ASN Berprestasi tingkat Direktorat Jenderal,” jelasnya.

Selanjutnya Aryo dinominasikan kembali menjadi ASN Berprestasi Kominfo, namun berbeda dengan saat mengikuti seleksi ASN tingkat Direktorat Jenderal, pada seleksi tingkat Kementerian ini penilaian dilakukan oleh seluruh eselon 1 dengan pertanyaan komprehensif, tidak hanya isu terkait *project* yang dibawakan saja (refarming), namun juga isu terkait Direktorat Jenderal lain seperti percepatan proses Analog Switch Off, revisi Undang-Undang Penyiaran, aplikasi telematika dan lainnya. “Di sini mulai dinilai cakrawala berfikir kita, dari cara meng-*handle* suatu kasus, cara menjawab pertanyaan yang diluar *main core* kita, juga tentunya *personality* kita sebagai ASN” ujar Aryo.



### Anugerah ASN, The Future Leader

Masuk sebagai Finalis ASN Berprestasi Kominfo, Aryo kemudian diarahkan oleh Biro Kepegawaian untuk mengikuti seleksi Anugerah ASN 2019 yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Lagi-lagi hingga *last minute* Aryo baru mendaftar untuk kategori The *Future leader*, yang menjadi kategori baru dalam Anugerah ASN 2019, disamping kategori PNS Inspiratif dan PTT Teladan.



Sebanyak 1.051 ASN dari 281 instansi pemerintah diusulkan dalam Anugerah ASN 2019. Dari usulan tersebut dilakukan beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi; dilanjut Seleksi Tahap I dimana dipilih 100 kandidat terbaik dari ketiga kategori. Kemudian pada Seleksi Tahap II, dipilih 10 kandidat terbaik di setiap kategori dan dilakukan verifikasi lapangan. Selanjutnya pada tahap III, dari 10 nomine terbaik dipilih Top 5 pada masing-masing kategori. Kemudian Top 5 untuk ketiga kategori tersebut wajib mengikuti tahapan wawancara untuk selanjutnya dipilih tiga terbaik untuk masing-masing kategori.

Untuk kategori *The Future leader*, Aryo menjelaskan bahwa seleksi dilakukan oleh tim dewan juri independen diantaranya Mantan Menpan Azwar Abubakar, Kepala BKN Bima Haria, Dirut TVRI Helmy Yahya, Kang Maman ILK, CEO GNFI Wahyu Aji dan Penggiat Literasi Digital Ahmad Nugraha. Wawancara berlangsung sangat cepat, karena peserta hanya diberikan waktu selama 10 menit untuk presentasi dan 20 menit untuk tanya jawab. "Saat wawancara, selain pertanyaan terkait refarming, dewan juri juga bertanya terkait televisi digital, pemblokiran medsos, *data center*, pencurian data, dan lainnya. Dalam tahap ini, pertanyaan non teknis lebih



dominan dibandingkan dengan *issue* teknis terkait *refarming*. Selain itu tak jarang para juri mengajukan pertanyaan bilingual dalam Bahasa Indonesia dan Inggris terkait *personality* kita “*What you think about a Leader?* Ya saya jawab lagi pakai bahasa Inggris, “*Being a Leader is an Art.. bla bla bla...*” ungkap Aryo sambil menyeringai.

Sebagai satu-satunya wakil kementerian (pusat), karena peserta lainnya adalah perwakilan daerah, Aryo memberikan tips bagi siapapun yang akan mengikuti Anugerah ASN diantaranya bahwa kita harus mampu mengubah sudut pandang atas sesuatu. Aryo mengatakan bahwa rata-rata finalis yang berasal dari daerah menyajikan inovasi yang mampu memberikan terobosan layanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Tak jarang mereka “menjual keprihatinan”, dengan keterbatasan yang ada, mereka mampu memberikan pelayanan yang maksimal didukung dengan aplikasi berbasis TIK. Sedangkan kita berada di Jakarta dengan segala fasilitas bintang 5. Jika dipikir sekilas, tentu akan sulit bersaing *head to head* dengan mereka.

Namun jika dipikir dengan seksama, hal ini justru suatu kelemahan yang juga sekaligus kekuatan Kominfo khususnya Ditjen SDPPI. Kita

memiliki *scope* nasional yang menjangkau mulai dari kota metropolitan hingga daerah terpencil dan perbatasan 6LU-11LS, 95-141BT, mulai dari milyuner sampai rakyat biasa. Melalui penataan ulang frekuensi 4G, diharapkan setiap masyarakat dapat menikmati segala keunggulan teknologi kelas dunia.

“Kita ubah sudut pandang, bukan dengan pertanyaan apa manfaat *refarming*, tapi justru dengan adanya *refarming* inilah maka aplikasi-aplikasi dari seluruh finalis lain bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Aryo.

Lebih lanjut Aryo mengatakan bahwa ada persoalan mendasar yang sering dirasakan, bahwa banyak dari kita memiliki ide-ide brilian, namun kita tidak mengemasnya menjadi suatu barang yang bernilai tinggi. Bukannya tidak mampu, tapi mungkin tidak tau, kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita memiliki barang yang sangat berharga. “Banyak orang yang tidak mengerti apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Kominfo, terlebih *refarming* frekuensi. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa Kominfo telah melakukan pekerjaan yang sangat penting dan besar manfaatnya bagi negara,” tambahnya.

Untuk itu Aryo mengajak rekan-rekan di Kominfo selain terus mengasah kemampuan teknis juga berlatih untuk menjadi marketing. “Menjual” ide-ide agar pekerjaan kita dapat dilihat masyarakat dan PR besar kita adalah di sisi *packaging*. “Bukannya menganjurkan untuk pameran, tapi di zaman medsos ini, kita perlu menyebarkan informasi positif sebanyak dan seluas-luasnya agar terjadi kesetimbangan informasi positif di dunia maya. Dengan demikian akan menciptakan ketenangan, masyarakat akan merasa aman dan diperhatikan jika negara hadir untuk membantu. Itulah tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” ajaknya.

### The Spectacular Awarding Night

Malam Penganugerahan ASN 2019 yang dilaksanakan di Auditorium TVRI Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019 menjadi momen istimewa bagi Aryo juga para finalis lainnya.



Didampingi Direktur Penataan Ditjen SDPPI, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Bagian Umum SDPPI juga isteri dan rekan-rekan lain, Aryo menerima penghargaan sebagai Tiga Terbaik untuk kategori *The Future leader*.

“Saat pengumuman kategori *The Future leader*, nama saya disebut di urutan pertama. Menurut panitia, tahun ini tidak ada peringkat 1,2,3 hanya 3 terbaik saja. Tapi urutan tersebut diurutkan berdasarkan nilai terbaik. Ya memang tidak berpengaruh, tapi ini merupakan sebuah *self esteem* buat saya pribadi, karena semua ini memang *beyond my expectation*,” ujar Aryo.

Menjadi *future leader* dikatakan Aryo bukan Cuma sekedar jargon, tapi benar-benar harus selalu mendengar dan belajar. Sehingga nanti ketika benar-benar menjadi *the real leader* dapat memberikan yang terbaik untuk organisasi dan masyarakat.

Sebagai penutup, Aryo mengucapkan rasa syukur tak terhingga atas anugerah ini, juga terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Kominfo, rekan kerja, handai taulan, seluruh sahabat dan keluarga besar yang telah mensupport selama ini. “Capaian ini adalah awal yang baik bagi Kementerian Kominfo, khususnya Ditjen SDPPI untuk terus berkarya memberikan yang terbaik bagi bangsa ini,” pungkas Aryo.



## PROFIL

### Tour of Duty

**2006**

**UPT Balai Uji**

CPNS Penguji Perangkat  
Telekomunikasi

**2007**

**Dit Frekuensi**

Technical Analysis  
Broadcasting

**2015**

**Dit Penataan**

Kasi Penataan Frekuensi  
Mobile Service

**2018**

**Dit Penataan**

Kasubdit Penataan Fixed  
& Mobile Service

**2012**

**Dit Penataan**

Kasi Penataan Frekuensi  
Fixed Service

**2017**

**Dit Penataan**

Kasi Penataan  
Frekuensi Broadcasting

**2019**

**Setdit SDPPI**

Kabag Perencanaan  
Program & Pelaporan

### Diklat Struktural

**2006** \_\_\_\_\_ Diklat Prajabatan

**2012** \_\_\_\_\_ Juara #1 Diklat PIM 4

**2017** \_\_\_\_\_ Juara #1 Diklat PIM 3

### Background

**SMUN 3**

Bandung

**SI TEKNIK**

**ELEKTRO UI**

Jakarta

**SI**

**Electrical**

**Eng QUT**

Brisbane

**S2 Teknik**

**Industri**

**ITB**

Bandung





Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo turut hadir dalam acara Open House Perayaan Natal 2019 di kediaman Menkominfo Johnny G. Plate di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).



Pertunjukan kesenian daerah Manggarai, Flores menghadirkan nuansa perayaan Natal yang berbeda saat Open House Perayaan Natal 2019 di kediaman Menkominfo Johnny G. Plate di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).









Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Menkopolhukam Mahfud MD berbincang dengan Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI saat Open House Perayaan Natal 2019 di kediaman Menkominfo, Rabu (25/12/2019).



Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan istri, Ibu Maria Anna, berfoto bersama grup musik usai membawakan lagu-lagu bernuansa tradisional dari daerah Manggarai, Flores., saat Open House Perayaan Natal 2019, Rabu (25/12/2019).



# WARGANET MEMOTRET KERJA KOMINFO 2019

Hanya satu dari delapan orang di Indonesia yang belum mengetahui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahkan warganet paling tahu mengenai penanganan konten negatif yang dilakukan Kementerian Kominfo.



Jelang akhir tahun 2019, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo melibatkan MarkPlus, Inc untuk melakukan Survei Persepsi Publik. Salah satu hasilnya, hanya 1 dari 8 orang di Indonesia yang belum mengetahui Kementerian Kominfo. Hasil yang cukup menggembirakan, pasalnya dengan dikenal warganet selanjutnya upaya untuk mengenalkan kerja dan program Kementerian akan lebih mudah.

Kementerian yang sekarang dipimpin Johnny G. Plate itu dikaitkan oleh warganet dengan internet dan media.

Lebih jauh, warganet mempersepsikan Kementerian Kominfo sebagai lembaga yang memberikan informasi ke masyarakat mengenai komunikasi dan informatika (21%); membangun infrastruktur jaringan internet hingga pelosok desa (18%) dan menyaring konten negatif di jaringan internet (17%).

## 21%

Lembaga yang Memberikan Informasi ke Masyarakat Mengenai Komunikasi dan Informatika

## 18%

Membangun Infrastruktur Jaringan Internet Hingga Pelosok Desa

## 17%

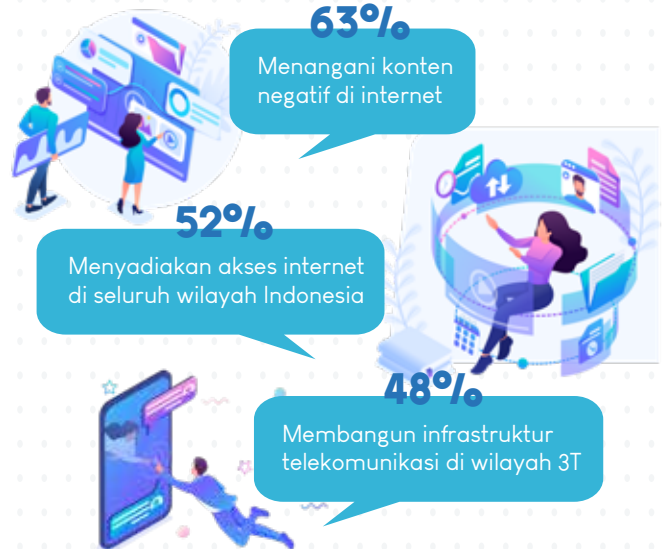
Menyaring Konten Negatif di Jaringan Internet

PERSEPSI WARGANET TENTANG KOMINFO

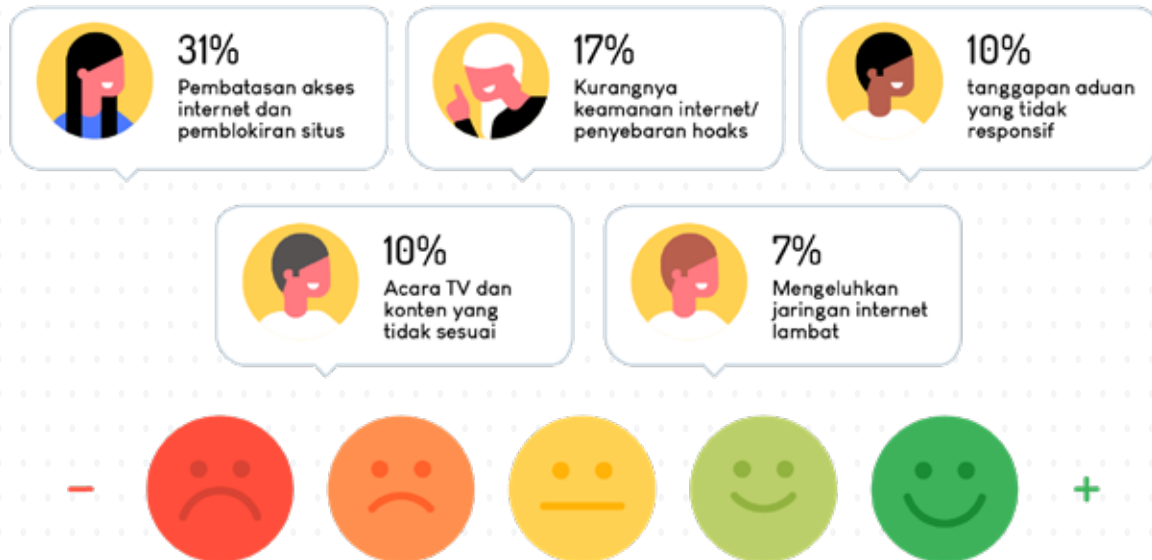


## TOP 3

### TUGAS KEMENTERIAN KOMINFO MENURUT PUBLIK



## PENDAPAT PUBLIK



Meskipun demikian, ada pengalaman tidak menyenangkan dengan Kementerian Kominfo terutama dalam hal pembatasan akses internet dan pemblokiran situs (31%) serta kurangnya keamanan internet/penyebaran hoaks (17%). Berikutnya ada responden yang menilai tanggapan aduan yang tidak responsif (10%), acara TV dan konten yang tidak sesuai (10%) serta 7% responden mengeluhkan jaringan internet lambat.

### Spektrum Pengetahuan Warganet

Kebanyakan responden mengetahui program Kementerian berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE (45,7%). Selain itu, responden juga mengenali Kementerian Kominfo mengenai aduan konten (28,5%), UMKM Go *Online* (19,4%) dan Gerakan 1000 Start Up Digital (19,0%) serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP (14,6%).

Hal yang menarik, sebagian besar responden bersedia untuk membagikan informasi terkait

program Kominfo karena dianggap sebagai informasi yang bermanfaat. Sebanyak 87,8% responden menyatakan kesediaan untuk membagikan informasi terkait dengan program Kementerian Kominfo kepada kerabat dan keluarga.

Jika ditelusuri lebih mendalam, terkait isu UU ITE, warganet sangat meminati isu UU dari aspek hukuman untuk pelanggar dan substansi tentang UU ITE. Informasi yang paling dicari oleh masyarakat mengenai UU ITE adalah hukuman untuk pelanggar seiring dengan maraknya isu-isu pelanggaran UU ITE.

Soal aduan konten, warganet banyak mengetahui cara untuk melakukan pengaduan konten negatif. Hal yang menarik karena proses pengaduan sudah banyak disebarakan melalui akun media sosial Kementerian Kominfo. Terutama, dalam menggunakan laman [aduankonten.id](http://aduankonten.id) untuk melaporkan 12 kategori konten yang dilarang dalam UU ITE, yang meliputi: pornografi/pornografi anak, perjudian, pemerasan, penipuan, kekerasan/kekerasan anak, fitnah/pencemaran



nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, produk dengan aturan khusus, provokasi SARA, berita bohong/hoaks, terorisme/radikalisme, dan informasi/dokumen elektronik melanggar UU lainnya.

Sementara dalam Program Gerakan 1000 Start Up Digital, Warganet mengetahui program itu sebagai upaya pembinaan dan pengembangan startup di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam isu UMKM Go Online, warganet mengetahui bahwa program yang dilakukan oleh Ditjen Aplikasi Informatika dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik itu memberikan kesempatan pada para UMKM untuk menggunakan platform online. Program itu juga dikenal sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Sementara terkait UU KIP, warganet mengetahui sebagai informasi yang diberitahukan secara terbuka. (Meita/m)

## TENTANG SURVEI PERSEPSI PUBLIK

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerja sama dengan Markplus, Inc., melakukan survei persepsi publik sejak Oktober 2019. Survei melibatkan 500 responden yang berada di 13 kota, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Medan, Makasar, Manado, Batam, Palembang, Pontianak, Denpasar, Balikpapan, Ambon, Kupang, dan Jayapura. 500 responden tersebut menggambarkan publik Indonesia secara keseluruhan.

Survei tersebut dilakukan secara *online* dengan menyebarkan *link* ke responden yang memenuhi kriteria, yaitu berusia minimal 17 tahun, tidak memiliki anggota keluarga inti yang bekerja di bidang perusahaan riset/konsultan pemasaran, perusahaan periklanan/agen periklanan, jurnalis (TV, radio, surat kabar, majalah, dan tabloid), dan Kementerian Kominfo. Pemilihan metode pelaksanaan survei secara *online* dipilih dengan pertimbangan *real time response*, biaya yang lebih murah, dan waktu pengerjaan yang lebih singkat.

Dalam survei ini, Kementerian Kominfo memfokuskan penelitian pada 3 (tiga) hal, yaitu Persepsi terhadap Institusi, Pengetahuan Publik Mengenai Kegiatan/Program Kominfo, dan Efektivitas Program Komunikasi. Persepsi terhadap Institusi dilakukan untuk mengetahui *image* dan persepsi yang terbentuk tentang

Kominfo; sementara Pengetahuan Publik terhadap Kominfo untuk mengukur kesadaran dan pengetahuan masyarakat; dan terakhir bagian Efektivitas Program Komunikasi untuk mengetahui efektivitas metode program komunikasi.

Secara demografi, hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden yang mengikuti Survei Persepsi Publik ini memiliki karakteristik usia sekitar 25 s.d. 34 tahun (24%), dengan pendidikan terakhir adalah SMA atau sederajat (46,8%), dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta (43,2%). Pada tahap awal dilakukan proses *screening* responden dan ditemukan hanya 1 dari 8 orang di Indonesia yang belum mengetahui tentang Kominfo.

**KARAKTERISTIK USIA**  
24% responden berusia sekitar 25 s.d. 34 tahun

**PENDIDIKAN TERAKHIR**  
46,8% SMA atau sederajat

**PEKERJAAN**  
43,2% responden adalah Pegawai Swasta







## SUMBER INFORMASI : WEBSITE INSTITUSI PALING UTAMA

Sebagian besar responden survei **terekspos pertama kali** dengan Kementerian Kominfo melalui berita di TV. Sebanyak 22,8% responden menyatakan mendengar informasi soal Kementerian Kominfo lewat media televisi.

Sebanyak **21,2% responden** mendapatkan informasi soal Kementerian Kominfo dari platform media sosial Facebook. Sementara dari berita online, sebanyak 21%.



Menariknya responden yang mengakses website [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) sebanyak 17,2% responden. Hal itu menunjukkan **website institusi menjadi sumber informasi utama** baik untuk mencari informasi terkait Kementerian Kominfo. Bahkan, berdasar jawaban responden, Tim MarkPlus menyebutkan website institusi dan sosialisasi/penyuluhan dianggap media yang paling efektif karena bersumber langsung dari pihak terkait.



# KOMINFO NGAPAIN SAJA?



Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang paling banyak diketahui oleh masyarakat terutama yang tinggal di beberapa kota besar adalah memberikan informasi ke masyarakat. Sementara, masyarakat yang sebagian besar tinggal di kota kecil menyebut tugas Kementerian Kominfo saat ini membangun jaringan internet hingga pelosok desa.

Pemahaman seperti itu mungkin tidak jauh dari interaksi para responden dengan lembaga yang kini dipimpin oleh Johnny G. Plate ini. Sekitar 12% responden pernah berinteraksi dengan Kementerian Kominfo melalui kegiatan seminar, sosialisasi, kuliah atau workshop. Selama

tahun 2019, ragam kegiatan itu memang relatif banyak dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.

Isunya pun beragam, mulai dari soal pengenalan dan pemanfaatan frekuensi radio, literasi digital, perizinan,

dan berbagai isu kebijakan pemerintah dari soal dukungan telekomunikasi penanganan bencana maupun kisah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, ada interaksi proaktif yang dilakukan oleh warganet misalnya mencari data statistik yang dikeluarkan Kementerian Kominfo (9,6% responden) atau ada yang melakukan pengaduan konten negatif (8,2%) serta pengajuan perizinan (8%).



## Antisipasi Pengalaman Tak Menyenangkan

Tak ada gading yang tak retak. Tampaknya hal itu juga berlaku bagi warganet yang berinteraksi dengan Kementerian Kominfo. Soal pembatasan akses internet dan kurangnya keamanan internet paling sering dikeluhkan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan.

Meski begitu hanya 6% dari keseluruhan 500 responden yang mengakui adanya pengalaman tidak menyenangkan. Tak lebih dari 10% responden menilai pembatasan akses internet dan pemblokiran situs sebagai hal yang tidak menyenangkan. Padahal Kementerian Kominfo melakukan hal itu berdasarkan aduan masyarakat dan dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Mengenai keamanan internet, warganet lebih menyoroti soal penyebaran hoaks. Memang sepanjang tahun 2019 terdapat 431.065 aduan konten yang disampaikan masyarakat melalui portal aduankonten.id atau kanal media sosial dan WhatsApp. Sementara terkait hoaks, tercatat sejumlah 15.361 aduan. Paling banyak, soal pornografi (244.738 aduan) dan fitnah (57.984 aduan). Konten itu tersebar di akun media sosial, website atau bahkan aplikasi.

Ada pula yang menilai kecepatan internet lambat. Sekitar 7% dari 29 responden menyebutkan hal itu. Tentu pengalaman tidak menyenangkan ini akan menjadi amunisi bagi Kementerian Kominfo untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

“Harapan Kementerian Kominfo ya meneruskan harapan rakyat, yaitu *speed* internetnya cepat, itu yang disampaikan,” ungkap Menteri Kominfo Johnny G. Plate kepada wartawan dalam sebuah kesempatan di Jakarta, jelang akhir Desember 2019 lalu.

Bahkan setiap momen liburan, Kementerian Kominfo juga selalu berupaya mendorong operator telekomunikasi menjaga kualitas layanannya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli menjelaskan untuk mengantisipasi peningkatan dan pergerakan trafik percakapan dan data saat Liburan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru), pemerintah telah melakukan monitoring/ pengecekan jaringan/pengukuran kualitas layanan telekomunikasi (*quality of service/ QoS*).

“Terutama di titik pusat keramaian/POI prioritas seperti airport/bandara, tempat wisata, bis, stasiun, pelabuhan, mall, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, pusat perayaan tahun baru, dan jalur mudik,” jelasnya.

Tujuan pemantauan itu agar semua operator seluler meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan telekomunikasi/QoS. Mungkin jika dituliskan dalam lembaran majalah ini, apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo tidaklah cukup. Sebab, soal kualitas layanan telekomunikasi hanya satu dari sekian banyak tugas Kementerian Kominfo.

## Dukung Visi Indonesia Maju



Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyebutkan lembaga yang dipimpinnya memiliki dua komponen penting. Keduanya diarahkan untuk mendukung Lima Fokus Pembangunan Nasional dalam Rangka Indonesia Maju.

“Kominfo ini terdiri dari dua komponen yang penting, yaitu komunikasi dan informasi, tugasnya mentransmisikan capaian-capaian kinerja dan capaian yang dilakukan oleh Pemerintah agar diketahui oleh rakyat. Kedua peran informatika adalah tugas Kominfo untuk menyediakan sarana prasarana di hulu sampai di hilir dan pemanfaatan konten-konten pada semua platform dan aplikasi,” kata Menteri Johnny dalam Panel IV Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Guna mendukung pencapaian visi Indonesia Maju, menurut Menteri Johnny, program prioritas Kementerian Kominfo diarahkan untuk pemeratakan informasi capaian kinerja Pemerintah dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

“Fokus utama program Kemenkominfo yang turut mendukung Visi Presiden 2020-2024 terkait penyediaan infrastruktur TIK di wilayah Non Komersial (USO) menyangkut Palapa Ring, BTS, akses internet, dan satelit multifungsi. Palapa Ring yang terdiri dari proyek jaringan terpanjang 12.148 km yang menghubungkan 90 kabupaten/kota di Indonesia dengan jaringan optik,” jelasnya.

Sementara itu BTS, penyediaan jaringan telekomunikasi seluler di daerah *blankspot* tahun ini sebanyak 698 lokasi dan ditargetkan pada tahun 2020 menjadi 3.447 lokasi.

“Untuk akses internet yang terkait dengan penyediaan wifi untuk sekolah, puskesmas, kantor desa/kecamatan, dan lain-lain, tahun ini telah dibangun di 2.200 lokasi dan ditargetkan pada tahun 2020 menjadi 12.000 lokasi,” papar Menteri Johnny.

Mengenai satelit multifungsi, Menteri Kominfo menjelaskan telah dilakukan proyek layanan internet cepat di 150.000 lokasi yang tidak terjangkau layanan broadband terestrial dengan teknologi Very-High Throughput Satellite. “Untuk secara khusus wilayah 3T (Tertinggal, terdepan, dan terluar) antara lain dengan membangun BTS, hingga saat ini yang sudah dibangun banyak sekali di Indonesia, tahun 2020 akan dibangun 3.447 BTS yang akan disebar di 29 provinsi di Indonesia,” kata Johnny.\*



# EKSPEKTASI WARGANET TERHADAP KONTEN DAN KONSEP MEDIA KOMINFO



FACEBOOK

### Ekspektasi Konten

- Program Kominfo 41,4%
- Edukasi penggunaan medsos 13,8%

### Ekspektasi Konsep

- Tulisan lengkap dan detail 75%
- Video durasi 1-2 menit 66,4%



BERITA ONLINE

### Ekspektasi Konten

- Berita fakta 18,5%
- Program Kominfo 17,3%

### Ekspektasi Konsep

- Tulisan lengkap dan detail 48,1%
- Infografis menarik 44,4%



BERITA TV

### Ekspektasi Konten

- Program Kominfo 20,8%
- Informasi kebijakan 15,3%

### Ekspektasi Konsep

- Video durasi 1-2 menit 54,2%
- Tulisan lengkap dan detail 52,8%



YOUTUBE

### Ekspektasi Konten

- Program Kominfo 40%
- Program tentang startup 10%
- Keberhasilan UMKM yang sudah go online 4,3%

### Ekspektasi Konsep

- Video durasi 1-2 menit 81,4%
- Video infografis menarik 74,3%



WEBSITE INSTITUSI

### Ekspektasi Konten

- Program Kominfo 15,8%
- Informasi Kebijakan 15,8%
- UU ITE 7,9%

### Ekspektasi Konsep

- Tulisan lengkap dan detail 55,3%
- Infografis menarik 50%

## PENILAIAN WARGANET ATAS KONTEN MEDIA KOMINFO

1 2 3 4 5 6



4,1 / 6

Base : Semua Responden  
n = 500

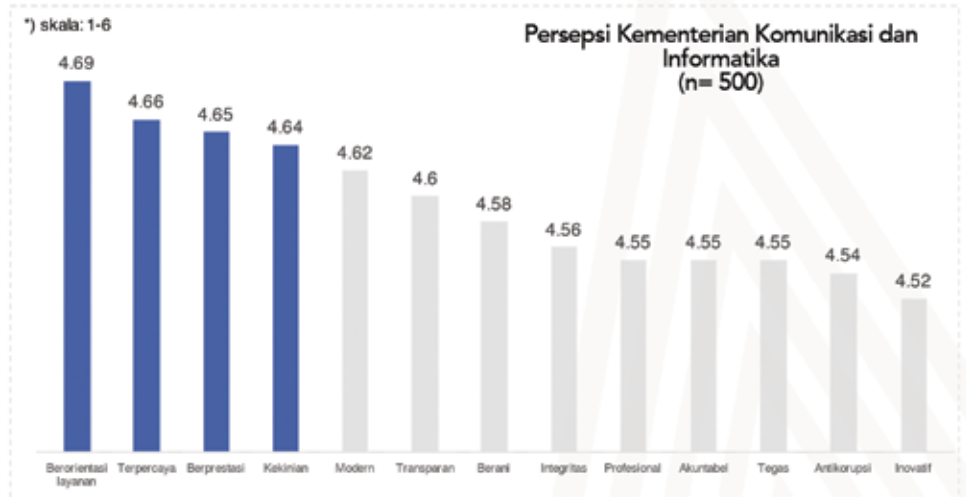
**Tempat Tinggal**

Kota	Jumlah Responden
DKI Jakarta	60
DI Yogyakarta	50
Medan	43
Makassar	40
Manado	40
Batam	37
Palembang	35
Pontianak	35
Bali	34
Balikpapan	34
Ambon	32
Kupang	30
Jayapura	30



## PERSEPSI KOMINFO

KOMINFO dianggap sudah berorientasi layanan dan terpercaya di mata para masyarakat



## PROGRAM KOMINFO

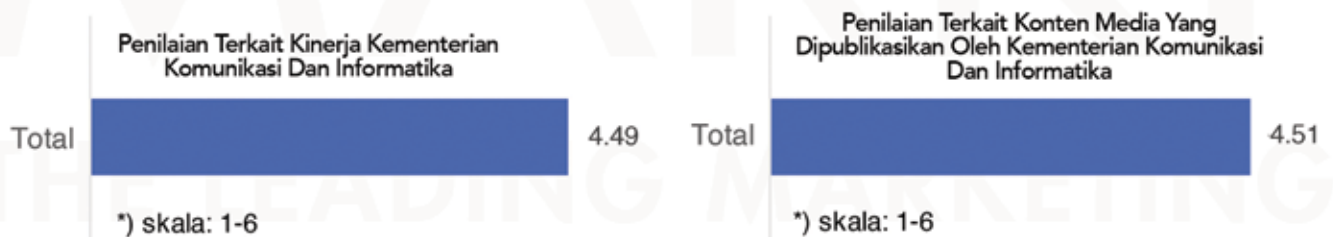
Program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang paling diketahui oleh masyarakat Indonesia

UU ITE	Aduan Konten	Gerakan 1000
<p><b>Apa yang Anda ketahui mengenai UU ITE? (n= 182)</b></p> <p>Aturan UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. <b>34.6%</b></p> <p>Aturan hukum dalam bermedia sosial. <b>22.5%</b></p> <p>Aduan yang dilaporkan pengguna internet terhadap berita berita hoax <b>11.0%</b></p> <p>Aduan terhadap konten konten negatif <b>7.7%</b></p> <p>Melakukan pengawasan terhadap aktivitas seseorang di dunia Maya <b>6.6%</b></p> <p>Aduan untuk masalah Masalah kejahatan di media sosial <b>4.9%</b></p> <p>Aturan hukum yang harus dipatuhi ketika kita menggunakan akses media komunikasi <b>2.2%</b></p> <p>*) pertanyaan terbuka</p> <p><b>Penilaian UU ITE: 4.53/6</b></p>	<p><b>Apa yang Anda ketahui mengenai Aduan Konten? (n= 105)</b></p> <p>Aduan terhadap konten konten negatif <b>89.5%</b></p> <p>Aduan untuk masalah Masalah kejahatan di media sosial <b>2.9%</b></p> <p>Menyampaikan permasalahan yang ada dalam satu wadah yang berkompeten <b>2.9%</b></p> <p>Aduan yang dilaporkan pengguna internet terhadap berita berita hoax <b>1.9%</b></p> <p>*) pertanyaan terbuka</p> <p><b>Penilaian Aduan Konten: 4.73/6</b></p>	<p><b>Apa yang Anda ketahui mengenai Gerakan 1000? (n= 105)</b></p> <p>Melakukan pembinaan pengembangan startup sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi</p> <p>Akses buat 1000 start up digital</p> <p>Pembangunan jaringan</p> <p>Penyuluhan seminar IT</p> <p>*) pertanyaan terbuka</p> <p><b>Penilaian Gerakan 1000: 4.51/6</b></p>



## PENILAIAN KINERJA KOMINFO DAN KONTEN MEDIA

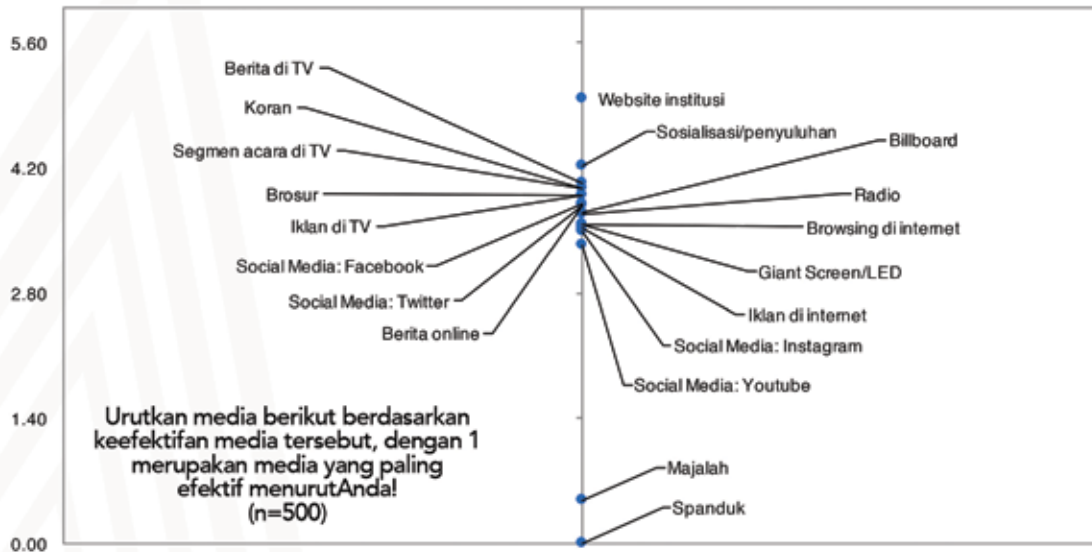
Secara garis besar, kinerja KOMINFO di mata masyarakat sudah cukup baik, dan penilaian masyarakat terhadap konten media yang dipublikasikan oleh KOMINFO tergolong tinggi.





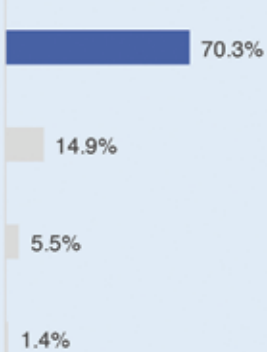
# EFEKTIFITAS MEDIA

Website institusi dan sosialisasi/penyuluhan dianggap media yang paling efektif karena bersumber langsung dari pihak terkait



## UU Start Up

Apa yang Anda ketahui mengenai UU Start Up Digital? (n= 74)



Penilaian UU Start-Up Digital: 4.81/6

## UU IKP

Apa yang Anda ketahui mengenai UU KIP? (n= 50)



\*) pertanyaan terbuka

Penilaian UU KIP: 4.60/6

## UMKM Go Online

Apa yang Anda ketahui mengenai UMKM Go Online? (n= 70)



\*) pertanyaan terbuka

Penilaian UMKM Go Online: 4.76/6

## KESIMPULAN

- Bagi sebagian besar responden, KOMINFO diasosiasikan kuat dengan "internet" dan "media"
- Tugas KOMINFO yang paling banyak diketahui oleh masyarakat di kota besar adalah memberikan informasi ke masyarakat. Sedangkan di kota secondary, tugas yang diketahui adalah membangun jaringan internet hingga pelosok desa.
- Dari seluruh program yang dimiliki KOMINFO, program yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah UU ITE dan Aduan Konten.
- Informasi mengenai detail program dari KOMINFO belum terkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat.
- Media yang dianggap paling efektif dan terpercaya untuk mengakses informasi mengenai KOMINFO adalah website institusi, namun yang paling sering diakses oleh masyarakat masih media sosial seperti Facebook dan Youtube.





*Selamat  
Hari  
Natal*  
2019

*Glória in excélsis Deo,  
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.*

Kemuliaan bagi Allah di tempat  
yang mahatinggi dan damai di  
bumi kepada orang yang berkenan  
kepada-Nya.

*Putar majalah 180° untuk melanjutkan*



*Putusan majlislah 180° untuk melangkah ke depan*

**2020**

*Tahun Baru*

*Selamat*



ACT



PAR =



Advocate

BAR =

AWARE

Ada satu hal yang menarik dari hasil diskusi siang itu. Berbeda dengan pandangan umum bahwa komunikasi pemerintah dinilai berhasil hanya jika seluruh program diketahui publik, Hermawan justru menekankan pentingnya menetapkan strategi komunikasi sesuai kebutuhan tiap wilayah.

"Kan kepentingannya beda-beda, ada kabupaten yang banyak UMKM-nya, ada kabupaten yang banyak industri sama pertanian beda. Ini sebabnya menarik sekali Kominfo ini. Perlu *di-mapping* di tiap-tiap daerah, kalau nggak mau tiap kabupaten ya di tiap provinsi. *Musti strategic mapping*. Karena Indonesia ini memang kayak jadi satu, tapi sebabnya internet ini membuat kita jadi semakin egoisme, bukan egoisme sektoral tok ya, egoisme lokal itu juga," kata Hermawan.

Tak hanya faktor karakteristik tiap daerah, karakteristik produk pun perlu diperhatikan. "Kalau gayanya kan memang tergantung market. Tapi produknya ini kan lain-lain untuk tiap daerah. Contohnya tadi, secara umum orang di daerah itu ngerti BAKTI tapi nggak ngerti yang lain. Orang-orang kayak kita ini ngerti UU ITE tapi nggak ngerti yang lain. Nggak semua daerah harus tau semua program Kominfo. Strategi tiap daerah harus beda," kata Hermawan.





## Ngak semua daerah harus tau semua program kominfo. Strategi tiap daerah harus beda.



harus dibikin model lain. Kalau di media sosial kan harus *appealing* tadi, jadi bentuk di website dan di media sosial itu nggak bisa sama. Yang SA tadi banyak di digital, kalau di *traditional* itu 4A. Kalau media sosialnya nggak menarik, kan makin lama orang makin malas. Memang website itu hampir mati sekarang, tapi ya harus tetap hidup," kata Hermawan. Turut ditambahkan oleh Anggi, situs pemerintahan masih dianggap sebagai sumber informasi resmi oleh masyarakat.

karena masih menjadi media utama yang digunakan dalam mencari informasi terkait Kominfo. "Ini kan pemerintahan, masyarakat condongnya mencari informasi pemerintahan itu yang *official*. Seperti tadi Magie bilang, informasinya di media sosial tidak selengkap itu, dia juga mencari akun *official*, karena kita tahu sendiri di media sosial informasinya udah macam-macam, maka dari itu kenapa website institusi juga banyak diakses khususnya untuk Kominfo ini," jelasnya.



taunya cuma ITF, yang bukan ITF apa," jelasnya. Tim survei Markplus lainnya, Magie, menambahkan, perlu dicari WOW factor dari segmen di tiap kota. "Harus cari WOW factor-nya sih, kan tiap segmen hasilnya beda-beda. Yang bikin mereka amaze juga beda-beda. Jadi mungkin kalau di Jakarta, pembangunan infrastruktur sudah nggak amaze lagi bagi mereka," kata Magie.

Temuan lain yang juga disoroti tim Markplus, Inc. adalah situs institusi yang masih menempati peringkat pertama sebagai media utama untuk mencari informasi terkait Kementerian Kominfo, mengalahkannya media sosial. Menurut Magie, hal ini disebabkan kurangnya keberadaan Kemkominfo di

## Kominfo dan "Presence" di Media Social

media yang sering diakses publik, yaitu media sosial. "Jadi kalau kita lihat media yang paling sering mereka akses di sosial media, tapi khusus Kominfo larinya ke website. Mungkin di sini karena presence-nya kita, informasi yang mereka cari (terkait Kominfo, red.) itu belum bisa ditemukan di media sosial. Biasanya kita sarankan harusnya kita hadir di media yang mereka benar-benar sering akses. Jadi gampang connect-nya." Menurutnya jika Kominfo tidak menyediakan informasi lengkap di media yang sering diakses publik, dapat menyebabkan kesenjangan antara Kominfo dan publik. "Kalau informasinya ada di media lain yang mereka akses, ada gap di sana. Jadi mereka harus extra effort. Misalnya media yang sering diakses itu Instagram, tapi

informasi Kominfo ngga ada di Instagram makanya saya harus buka website. Mungkin kedepannya biar lebih connect, orang-orang lebih gampang, di media sosial itu juga dilengkapi informasi-informasi yang mereka cari. Di survey ini sudah ada kita kasih rekomendasi, misalnya informasi yang mereka cari tentang apa, itu mungkin bisa dilengkapi lagi." Ketika ditanya apakah temuan ini artinya Kemkominfo harus lebih dominan menyediakan informasi di media sosial, mengikuti tingginya penggunaan media sosial di era saat ini, Hermawan justru menekankan bahwa pemerintah tetap membutuhkan situs resmi institusi sebagai sumber informasi.

"Harus tetap ada, nggak bisa Anda di pemerintah tapi nggak masuk website. Tapi konten website itu kalau masuk media sosial





dia ahli apapun di media sosial. Agama yang begitu ruwet aja bisa ngaku dia ahli agama. Apalagi kalau cuma ahli kecantikan. Tapi apakah orang-orang itu punya *expertise* yang tinggi? Belum tentu. Makanya, orang balik lagi percaya pada yang *offline*.”

## Era medsos, semua orang bisa jadi “ahli”



“Jadi Kominfo itu mesti mengawinkan *online* dan *offline*, walaupun namanya komunikasi dan informasi. Informasinya *online* memang, tapi komunikasinya ya tetap *offline*, Omni, Jadi (pertama), semua ini harus tetap di bawah *framework* 5A, dan kedua solusinya mesti *Omni communication*. Bisa kita petakan nanti mana aja yang mesti digarap, kemudian komunikasi *online* *offline* apa yang cocok untuk ini. Dari hasil survey ini bisa dipetakan. Tapi kalau nggak dilanjutkan, ya cuma gini tok, kan rug!”

## Disparitas Ekspektasi Kota Besar dan Kota Kecil

Dalam obrolan siang itu, tim juga membahas temuan perbedaan indeks kepuasan antara responden di kota besar dan kota lainnya. Menurut Hermawan, hal ini dipengaruhi akibat perbedaan ekspektasi dan tuntutan antara penduduk di tiap kota.

“Kota besar itu banyak tuntutan. Kalau di kota kecil oranguntutannya nggak terlalu tinggi. Kepuasan itu kan menurut teori tergantung ekspektasi. Tuntutannya tinggi tapi pencapaian hanya sekian, ya nggak puas. Kalau kota kecil ekspektasinya nggak tinggi, jadi gampang melampaui (indeks kepuasan, red.). Teori komunikasi kan begitu. Makanya ekspektasi kadang kalau sudah ketinggian dari masyarakat, harus diturunkan sedikit. Supaya nggak gampang nggak puas. Tapi kalau terlalu rendah, nggak bagus juga.”

Ditambahkan juga oleh Anggi, tim survei dari Markplus, keberadaan infrastruktur yang sudah baik di kota besar juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya ekspektasi publik di kota besar. “Di kota besar, dari awal infrastrukturnya memang sudah bagus, jadi kalau kita membandingkan program-program kecil *impact*-nya belum begitu terasa. Apalagi, jadi kota besar masyarakatnya banyak, luas, jadi mungkin program-program kita itu belum tersampaikan semua. Cuma kalau di kota kecil, misalnya Kominfo datang bikin sosialisasi, dampaknya lebih gampang tersebar di kota kecil.”

Melanjutkan diskusi, Hermawan kembali menekankan pentingnya penelitian secara *online* dan *offline* untuk mengetahui pola komunikasi yang tepat. “Makanya harus dibikin *omni solution*, baik untuk kota besar maupun kota kecil. Produk yang dikomunikasikan yang belum diketahui apa saja. Kalau misalnya sudah tau programnya BAKTI, ya jangan BAKTI lagi. Di sini orang

**Kalau orang Aware akan kominfo tapi nggak tau semuanya, berarti ada yang kurang menarik, yang diketahui jadi negatifnya.**

Hermawan turut menekankan pentingnya penggunaan the Omni Way yang menyinerjikan antara online dan offline. Menurutnya pelaksanaan survei secara online dengan jumlah responden 500 orang di 13 kota belum cukup merepresentasikan hasil persepsi publik yang tepat di seluruh Indonesia.

“Menurut saya mesti Omni, online dan offline itu mesti dicampur. Karena dengan adanya media sosial ini semakin kacau, nggak tau mana yang benar mana yang salah. Orang sekarang bisa mengklaim



Poin ketiga dari kerangka A5, lanjutnya, adalah Ask. “Ketika orang sudah tertarik, dia akan tanya. Zaman sekarang kalau orang tidak appeal dulu, dia tidak akan ask, tidak akan mencari informasi lebih jauh. Makanya sekarang polanya masih salah. Orang politik, pakai gambar-gambar gede, tapi itu satu arah kan. Tapi yang bagus itu kan harus ada orang tanya, kita harus membuat diri kita menarik.”

Poin A yang keempat adalah Act, ketika orang di tahap membeli ide yang ditawarkan. Sementara poin A terakhir adalah Advocate. “Akhirnya men-support. Jadi nggak perlu kita sendiri yang meng-endorse. Jadi nggak meng-endorse. Jadi nggak perlu kita sendiri yang ngomong. Bahkan advocate itu bisa membantu, kalau ada orang asking dia yang menjawab. Jadi kita bisa memaknai hasil ini untuk membantu dalam kerangka 5A itu.”

Menurut Hermawan, permasalahan komunikasi sebagai lembaga pemerintah perlu dilihat dari kerangka A5. Dikutip dari situs marketeers.com, konsep A5 merupakan customer path terbaru yang dicituskan MarkPlus, Inc. pada April 2014, menggantikan tahapan konsumen 4A yang selama ini digunakan oleh berbagai sektor industri. Konsep ini muncul melihat pergeseran fenomena di era internet, di mana pembelian tidak lagi semata-mata kehendak pribadi namun telah menjadi keputusan bersama. (marketeers.com, 25/02/2015)

“Mestinya Anda melihat dalam kerangka 5A. Awareness, Kominfo cukup tinggi. Tapi apakah pesan-pesan Kominfo ini Appealing nggak? Menarik? Kalau orang Aware akan Kominfo tapi nggak tau semuanya, berarti ada yang kurang menarik, yang diketahui jadi negatifnya.”





# STRATEGI KOMUNIKASI HINGGA PRESENSI MEDIA SOSIAL JADI SOROTAN

● Wawancara dengan Hermawan Kartajaya, Founder & Chairman Markplus, Inc.

Jumat siang, (13/12/2019), Tim KominfoNext mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Founder & Chairman MarkPlus, Inc yang juga dikenal sebagai pakar *marketing*, Hermawan Kartajaya. Di ruang kerjanya, tim KominfoNext berbincang santai membahas hasil temuan Survei Indeks Persepsi Publik yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama MarkPlus, Inc., sekaligus membahas tindak lanjut yang diperlukan menyikapi hasil temuan survei tersebut.

Mengawali perbincangan siang itu, Hermawan menilai bahwa temuan survei persepsi publik atas Kementerian Kominfo ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Temuan bahwa publik tahu tentang Kominfo tapi hanya sedikit yang benar-benar mengetahui apa yang dilakukan Kominfo menandakan perlunya pemetaan strategis secara mendalam untuk pola komunikasi Kementerian Kominfo. Terlebih, ada perbedaan antara pemahaman publik di kota besar dan kota kecil.

"Kota besar itu taunya Kominfo ini ya UU ITE. Sementara di kota-kota kecil taunya BAKTI. Padahal orang-orang di kota kecil ini juga banyak UKM (Usaha Kecil Menengah, red.) yang seharusnya bisa dibantu. Sayangnya Wong Kominfo ini bisa melakukan banyak hal kok. Itulah, sayang sekali kalau Kominfo tidak menggunakan survei ini untuk kelanjutannya."



## Menyatukan Nusantara Melalui Palapa Ring





Direktorat Jenderal

IKP

Narasi Tunggal  
98  
Narasi untuk  
Kementerian/  
Lembaga

1811  
Konten

Produksi konten bidang  
Ekonomi & Maritim

Bisakah kamu tebak berapa kali  
FMB9 diselenggarakan?  
39    42    40

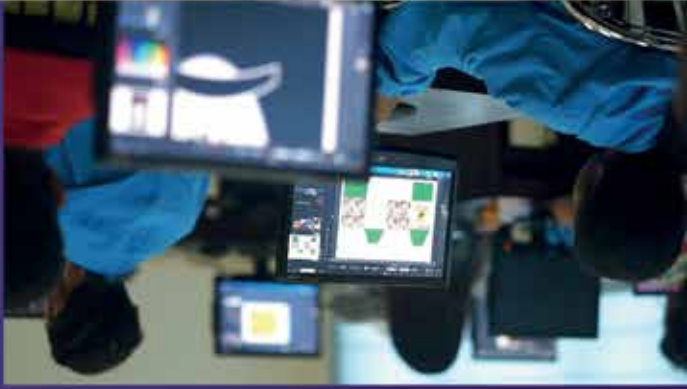
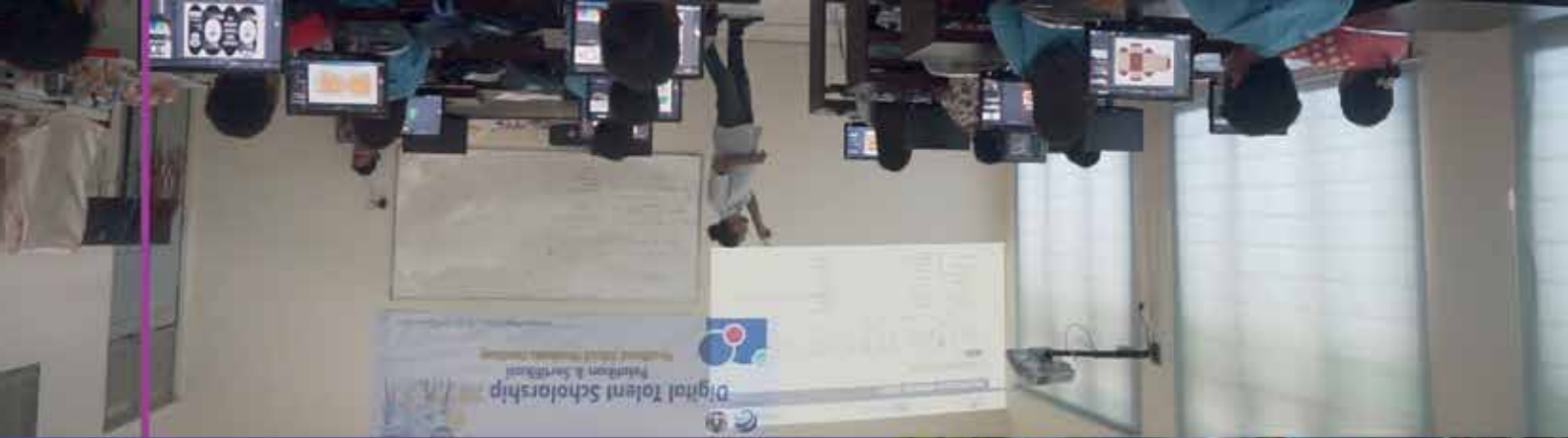
42  
The Answer is

Penyelenggaraan

Balitbang SDM

Digital Talent Scholarship

70.000+ pendaftar  
25.000 peserta



Direktorat Jenderal APTIKA

Gerakan Nasional 1000 Startup  
78,853 Partisipasi

# #2019Wrapped

Total 3.901 hoaks sudah teridentifikasi sejak Agustus 2018 hingga November 2019. Sebanyak 973 item hoaks yang berhasil diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kominfo adalah hoaks kategori politik.

Pengangan situs  
**201.315**

Pengangan konten media sosial  
**94.859**

Temuan isu hoaks  
**3.901**

Lembaga/komunitas bergabung  
**103**

Peserta aktif terjangkau workshop literasi digital  
**194.000**

UMKM Go Online  
**39.233**

# Kominfo 2019 in Numbers

Selamat datang di  
akhir dekade.  
Siap untuk  
lihat kilas balikhmu?

# Kominfo

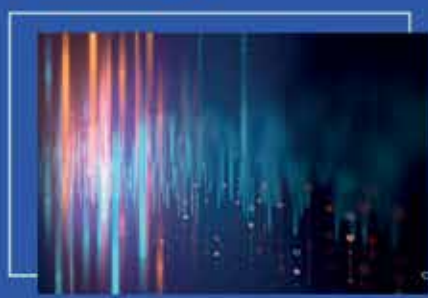


Wrapped #2019 Wrapped

2019

446.084  
Menerbitkan  
sertifikat perangkat  
telekomunikasi terbit  
izin Stasiun Radio di semua layanan  
seluruh Indonesia

SHARE ON TWITTER



5.483

Direktorat  
Jenderal SDPPI

Direktorat  
Jenderal PPI

Coverage 2G : 99,13% (luas pemukiman)  
Coverage 3G : 96,30% (luas pemukiman)  
Coverage 4G : 97,59% (luas pemukiman)

SHARE

GIVE RATE



JAKARTA, KOMPAS.com - Dua raksasa teknologi dunia, Google dan Facebook, diketahui akan membangun data center (pusat data) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate. "Google, Facebook sudah punya rencana membangun pusat data di Indonesia," kata Johnny di Istana Merdeka, Kamis (5/12/2019). Johnny mengatakan dalam membangun data center, ada beberapa hal yang perlu dipelajari seperti lokasi dan aliran data. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pusat datayang dibangun harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara setempat. "Free flow data dalam negeri maupun melewati batas negara itu perlu ada protokolnya. Tapi standarnya di PBB belum ada, ini yang harus dibicarakan sama-sama," katanya. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci kapan dan di mana tepatnya data center ini akan dibangun. "Tanya mereka, jangan

tanya saya. Tapi kalau mereka sudah investasi di sini kan bagus," pungkas Johnny. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Regulasi ini sempat mengundang polemik dan mendapat sorotan. Sebab, pada Pasal 21 Ayat 1 tertulis bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia dan/atau luar wilayah Indonesia". Pasal inilah yang kemudian diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan kedaulatan data yang digunungkan pemerintah

## SUMBER

<https://tekno.kompas.com/read/2019/12/06/13530087/google-dan-facebook-akan-bangun-data-center-di-indonesia>



"Kita berharap diakhir Tahun 2024, kecepatan internet di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah terdepan bisa pada level 10 Mbps dan kalau penempatan satelit kita lengkap, sekitar tahun 2025 nanti, kecepatan internet di Indonesia bisa 30 Mbps. Nah di situ lah cita-cita untuk Indonesia bertansformasi menjadi bangsa digital," terang dia.

Keempat, kata Johnny, pihaknya akan menata kembali frekuensi untuk memberikan layanan 5G dalam rangka mendukung revolusi industri 4.0. Penataan tersebut, tutur dia, dilakukan pada spektrum frekuensi lower band (700 MHz dan 800 MHz), middle band (2,6 GHz dan 3,5 GHz), dan upper band (26 GHz).

"Terakhir yang tak kalah penting, selain kita punya regulasi, infrastruktur, frekuensi, kita juga harus mempunyai digital talent dan telecommuni- cation talent yang memadai" ungkap dia.

Menurut Johnny, bangsa Indonesia harus mence- tak 600.000 digital talent atau orang-orang yang unggul di bidang industri digital setiap tahunnya. Dia mengakui bahwa Indonesia masih sulit untuk mencapai angka tersebut.

"Namun, kami di Kementerian Kominfo sudah melakukan beberapa jenis kegiatan yakni cy- ber-kreasi, pelatihan cyber yang menjangkau jutaan orang dan digital talent scholarship. Pada Tahun 2019, ada 25.000 digital talent scholar- ship dan tahun depan (2020) kami menerima 50.000 atau bahkan 60.000 digital talent schol- arship," beber dia.

Johnny juga berharap mitra kerja pemerintah dalam industri digital turut berkontribusi mence- tak digital talent. Dengan demikian, industri digital Indonesia berkembang pesat dengan sumber daya manusia yang memadai.

"Untuk Kementerian Kominfo mengajak eko- sistemnya, mitra kerjanya seperti Google, Facebook, Bukalapak, Tokopedia, Gojek untuk bersama melakukan kegiatan-kegiatan yang me- mungkinkan terciptanya digital talent," pungk- as Johnny.

## SUMBER

<https://www.bertasku.com/nasional/589851/langkah-johnny-plate-sebagai-menteri-kominfo-dari-tata-regulasi-hingga-cetak-digital-talent>

## SUMBER

<https://teknokompas.com/read/2019/12/06/121A1227/uu-perlindungan-data-privasi-dulu-data-center-facebook-dan-goo- gle-kemudian>

JAKARTA KOMPAS.com - Menteri Komunika- si dan Informatika Johnny Plate menyatakan Google dan Facebook berencana untuk memba- ngun data center di Indonesia. Namun sebelum rencana pusat server dua raksasa internet itu di- wujudkan, Johnny menyebut bahwa Undang-Un- dang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus terlebih dahulu disahkan.

Johnny menegaskan, hal tersebut menjadi pent- ing agar Indonesia dapat mengelola data dengan baik dan untuk memastikan agar data tidak disalahgunakan. "Ini tidak mudah. Kita telah ber- transformasi dan integrasi dari dunia fisik ke dun- ia digital karenanya itu kita perlu meningkatkan keamanan data. Management data kita harus baik untuk keamanan negara dan kepentingan pertumbuhan ekonomi negara," ujar Menkominfo Johnny. Ia mengatakan bahwa negara-negara lain sudah memiliki regulasi yang melindungi data pribadi, sementara Indonesia belum memilikinya. "Kita harus menyelesaikan UU PDP Indonesia. Saat ini bangsa-bangsa lain sudah punya, tetapi kita belum," tuturnya. Baca juga: Data Center di Indonesia Johnny Berharap UU PDP Dapat Segera Disahkan. Ia mengatakan, saat ini rancan- gan undang-undang terkait perlindungan data pribadi tersebut masih dalam proses dan akan segera diajukan kepada DPR pada akhir tahun ini. Ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (6/12/2019), ia kembali menegaskan harapannya agar Facebook dan Google membangun data center untuk kelancaran usaha mereka. "Indone- sia ini memiliki industri digital yang berkembang begitu cepat. Ini sangat menguntungkan juga untuk mereka (Facebook dan Google)," tutur Johnny. Menkominfo mengatakan, dua perusa- haan tersebut akan mendapatkan haknya dan juga wajib membayar pajak dengan baik. Pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia



Johnny sebenarnya mengakui bahwa peran komunikasi tersebut sudah terdistribusi ke masing-masing kementerian dan lembaga yang memiliki humasnya masing-masing termasuk Presiden yang memiliki jubah sendiri. Bahkan, kata dia, menteri dan kepala lembaga menjadi humas di masing-masing kementerian dan lembaga. "Namun, sebagai juru bicara negara, perlu komunikasi dari Kementerian Kominfo. Kami sedang membangun bagaimana komunikasi yang efektif agar lebih pas. Namun, kami sampaikan apabila media sulit mendapatkan informasi dari menteri atau kepala lembaga terkait, datang saja Kementerian Kominfo, kami siap memberikan informasi," tandas dia.

Ketiga, lanjut Johnny, Kementerian Kominfo, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi baik itu fiber optik, BTS (base trans-mission station) maupun satelitnya. Pihaknya, ingin memastikan ketiga infrastruktur tersebut menjangkau daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terdapat kecepatan internet bisa meningkat.



dan sektor yang terkait dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi.

Forum ini merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mewujudkan tata kelola internet yang inklusif dan responsif. Indonesia merupakan salah satu anggota dari IGF dengan peran yang penting dari berbagai kalangan seperti dari pendidikan, bisnis, masyarakat sipil dan pemerintahan tergabung di dalamnya.

## SUMBER

<https://www.antaranews.com/berita/1180112/menteri-kominfo-bertolak-ke-berlin-paparkan-kelola-internet-indonesia>

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate telah ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2019-2024. Sebagai menteri baru, Johnny memaparkan sejumlah hal yang akan dilakukan dalam 5 tahun mendatang dalam acara diskusi bersama Forum Perred di Crowne Plaza, Semanggi, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Pertama, kata Johnny, pihaknya akan menyelesaikan regulasi primernya yang terdiri dari dua undang-undang penting, yakni RUU Perind-ungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Penyiaran. RUU PDP, kata dia merupakan inisiatif usulan pemerintah dan akan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Sementara RUU Penyiaran menjadi inisiatif usulan DPR.

"Dari sisi pemerintah, ada tiga RUU juga yang penting, yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Pekerjaan, Omnibus Law Pajak dan Omnibus Law UMKM. Ketiganya terkait dan Kementerian Kominfo ada di dalamnya," ungkap dia.

Kedua, Johnny akan memperkuat peran komu-nikasi dari Kementerian Kominfo yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Menurut dia, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Kementerian Kominfo lebih fokus pada bagian informatika.

"Sudah saatnya dari pengalaman kita lima tahun lalu, masuk ke era sekarang, peran komu-nikasinya lebih dan perlu ditambahkan," kata Johnny.



# LANGKAH JOHNNY PLATE SEBAGAI MENTERI KOMINFO



Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate hari ini tiba di Berlin dalam rangka menghadiri Internet Governance Forum (IGF) 2019 untuk menyampaikan kesuksesannya tata kelola internet di Indonesia.

"Di forum itu, Menkominfo menyampaikan keberhasilan mengelola internet di Tanah Air, kemudian kita akan melihat pola-pola kerjasama yang bisa dibangun antar-negara, antara-kelompok di situ," ujar PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu kepada ANTARA dalam Kumpul Media di Bogor, Senin.

"Contoh keberhasilan, kita mengelola e-commerce dengan baik, hubungan antara pemerintah dengan swasta sehingga menghasilkan decacorn dan unicorn," lanjut dia.

Agenda Menkominfo di IGF Berlin akan berlangsung mulai 25 sampai 29 November 2019, diawali dengan menghadiri High Level Meeting dalam format "working breakfast" yang diselenggarakan Pemerintah Jerman.

Sesi tersebut dihadiri pejabat-pejabat dari Australia, Bangladesh, Chad, Costa Rica, Mesir, Prancis, Gambia, Iran, Jepang, Norwegia, Pakistan, Polandia, Lithuania, Rusia, Saudi Arabia, Spanyol, Inggris, European Commission, OECD, ITU, UNCTAD, dan UNESCO.

Pada sesi itu Menkominfo memaparkan kebijakan dan strategi Indonesia dalam hal infrastruktur dan konektivitas, penetrasi internet dan media sosial, ekosistem ekonomi digital, dan isu pengelolaan internet di Indonesia.

Setelah itu Menkominfo menghadiri pertemuan bilateral dengan Deputy Sekretaris Jenderal OECD, Ulrik Knudsen.

Kemudian, Menteri Johnny menjadi panelis dalam dua sesi diskusi, yaitu tentang "Security & Safety, Stability, and Resilience" dan "Data Governance".

Acara puncak IGF 2019 dilihat pada 26 November 2019. Menkominfo dijadwalkan menjadi salah satu panelis pada sesi "Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion" dan "Strengthening Digital Transformation through Digital Security".

Dalam pernyataan tertulisnya, Senin, Menkominfo Johnny mengatakan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, berhasil menunjukkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital baru dunia.

"Sangat menarik karena semua pencapaian tersebut bukan hanya diraih karena jumlah penduduk yang tinggi, namun juga oleh berbagai strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berikut ekosistem dan industrinya," kata Johnny.

Menurut laporan dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet pada tahun 2018.

Dengan pengguna dan pasar sebesar itu, Indonesia juga menorehkan catatan rekor dalam perkembangan ekonomi digital. Portal berita bisnis forbes.com bahkan menyebut bahwa Indonesia merupakan macan ekonomi digital di Asia Tenggara berkat ukuran ekonomi digitalnya.

Internet Governance Forum (IGF) adalah sebuah forum tata kelola internet multistakeholder dari seluruh dunia yang terdiri dari berbagai profesi

## Kembangkan Tiga Solusi Kesenjangan Informasi

Kementerian Kominfo, lanjutnya, kini sedang mengembangkan tiga solusi untuk menjembatani kesenjangan informasi di desa terpencil di Indonesia. Ketiga solusi yang sedang dikembangkan yaitu *digital economy*, *digital society* dan *digital government*. "Yang menarik kita diajarkan industri dan akademisi untuk mencari solusi mengatasi jembatani kesenjangan informasi yang ada di Indonesia," ujar Bambang.

Pembangunan Pusat Data Nasional ini sebagai salah satu perwujudan program strategis nasional, yakni penguatan infrastruktur e-Government oleh Kominfo RI.

la menyatakan, pengembangan pertama *digital economy* diharapkan pelaku industri bisa memanfaatkan informasi teknologi atau IT dengan sistem *cloud* yang disediakan pemerintah.

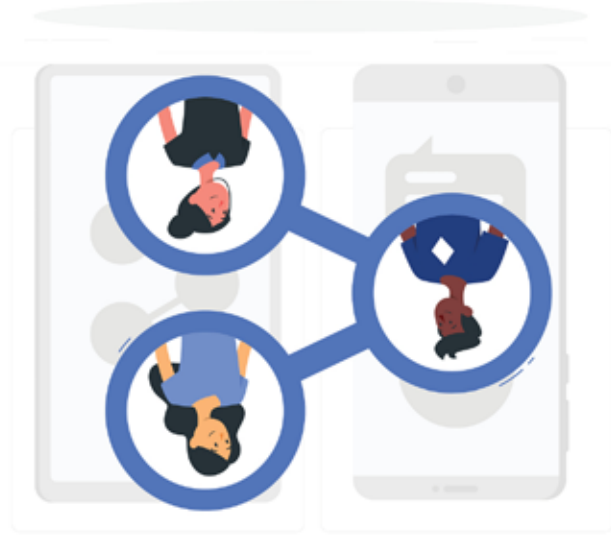
Kedua pengembangan *digital society* menyangkut alat komunikasi dan penyedia layanan data untuk pemerataan desa terpencil.

Ketiga pengembangan *digital government* untuk instansi pemerintah. Namun untuk pengembangan digital government di desa terpencil menurutnya masih terkendala jarak yang cukup luas di Indonesia.



Bambang Dwi Anggono, selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, mengungkapkan terdapat tiga fungsi utama Pusat Data Nasional. "Pertama, melayani seluruh pemerintah dari pusat sampai desa, baik kantor yang di dalam negeri maupun kantor yang di luar negeri, seperti KBRl juga akan dilayani. Kedua, menyediakan jaringan intra pemerintah, untuk mengamankan seluruh jaringan seluruh Indonesia, dimana pusat kendalinya berada di *data center*. Lalu ketiga, menyediakan titik penghubung layanan yang berfungsi mengintegrasikan sistem-sistem data yang ada di Indonesia menjadi satu data Indonesia, karena terdapat data-data yang berbeda di masing-masing instansi pemerintahan," tandasnya. (hm,ys)

"Penggunaan IT yang belum terjamah di tingkat desa terkendala ketika di tingkat terkecil di desa karena luasnya Indonesia dan terbatasnya energi listrik di tingkat desa terpencil, solusinya kita berikan satelit untuk memberikan sinyal sampai desa terpencil," pungkasnya.





## Fokus Terhadap Implementasi Government Cloud SPBE 4.0

Ibenk juga menjelaskan bahwa ke depannya arah implementasi *government cloud* pada SPBE 4.0 adalah integrasi layanan pemerintahan melalui penggunaan aplikasi umum yang berjalan pada jaringan intra pemerintah. "Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan akan membuat *repository* yang berisi katalog aplikasi dan layanan pemerintahan di Indonesia," tambahnya.

Kebutuhan terhadap infrastruktur IT yang kompleks dan andal saat ini sudah sangat diperlukan. Hal itu untuk mendorong pemanfaatan komputasi awan (*cloud computing*), di mana instansi pemerintah maupun swasta tidak harus memikirkan infrastruktur IT yang rumit dan harus dikelola sendiri.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) RI Bambang Dwi Anggono menjelaskan, saat ini sistem analisa merupakan salah satu kunci dalam penerapan industri 4.0 yang menyeluruh dan maksimal.

Jika masih berkuat pada bagaimana cara mengintegrasikan *e-planning* dan *e-budgeting*, hal itu masih berada di era industri 3.0. "Industri 4.0 adalah bagaimana kita mampu menganalisa kedua sistem tadi menjadi nilai tambah," imbuhnya.

Ada beberapa kendala dalam proses implementasi industri 4.0, menurut Bambang, antara lain minimnya dokumen perencanaan, belum meratanya telekomunikasi, kerentanan terhadap informasi, duplikasi informasi yang sangat tinggi, dan minimnya SDM yang bersertifikasi IT.

Bambang menuturkan, untuk itu ke depannya, sebuah daerah baik berupa lembaga tingkat kabupaten, kota, maupun Provinsi, harus memiliki satu *data center* saja sebagai upaya meminimalisir duplikasi informasi. Hal itu juga untuk meminimalisir pengeluaran APBN di tiap daerah.



# SICANTIK C L O U D



Singkatan dari **Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu** untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara **GRATIS**

Berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)*

la menambahkan, SICANTIK Cloud mendukung arah kebijakan SPBE dalam penggunaan teknologi bagi paksi dengan menggunakan teknologi komputasi awan. Instansi pengguna tidak perlu menyediakan domain, server, *hosting* dan/atau *data center*. Infrastruktur dan keamanan SICANTIK Cloud disediakan dan dikelola oleh Kementerian Kominfo. SICANTIK Cloud juga telah mendukung penggunaan tanda tangan digital untuk mempercepat dan mempermudah pengesahan dokumen perizinan.

Sementara, Smart Government memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kominfo berupaya menyediakan infrastruktur dan aplikasi umum berbasis *cloud* untuk pemerintahan pusat dan daerah. "Semangat Smart SPBE adalah melakukan transformasi reformasi terhadap layanan pemerintahan di Indonesia. Transformasi ini berangkat dari permasalahan di sisi aplikasi, infrastruktur, SDM dan kualitas layanan. Layanan pemerintahan di Indonesia belum standar dan terintegrasi," ucapnya.

## Bangun Infrastruktur Layanan Cloud Government

Direktur yang akrab disapa dengan sebutan "Ibenk" ini mengungkapkan, kecenderungan masing-masing instansi pemerintah untuk membuat aplikasi layanan pemerintahan sendiri, sehingga ditemui banyak aplikasi sejenis (duplikasi).

Sementara dari sisi infrastruktur yang menjadi isu utama adalah belum optimalnya pemanfaatan *data center* dan kerentanan keamanan informasi. "Untuk menjamin aksesibilitas layanan *cloud government*, Kementerian Kominfo melalui BAKTI telah membangun infrastruktur tulang punggung internet *roadband* yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia yang disebut Palapa Ring.

Selain itu, Kominfo juga menyediakan infrastruktur jaringan internet dengan menggunakan satelit berkecepatan 30 Mbps. "Palapa Ring dan satelit ini diharapkan dapat meningkatkan kesenjangan digital di seluruh wilayah Indonesia," jelas Direktur Bambang.



# PERMUDAH BIROKRASI LEWAT OSS KOMINFO HADIRKAN SICANTIK CLOUD



Jakarta, Kominfo - Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Bambang Dwi Anggono mengatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan guna meningkatkan efisiensi belanja TIK. Hal itu ia sampaikan ketika disambang ketika disambangi Tim Tok Tok Kominfo di ruang kerjanya pada Jumat 22 November 2019.



Menurut Direktur Bambang, salah satu strategi yang akan dikembangkan adalah melalui optimalisasi aplikasi umum berbasis komputasi awan. Saat ini, sebagian besar belanja TIK pemerintah masih digunakan untuk membangun aplikasi sejenis antar instansi pemerintah. Setiap instansi berlomba-lomba membuat aplikasi yang sama pada kegiatan pemerintahan dan layanan publik. "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sudah mengamatkan setiap instansi pusat dan daerah harus menggunakan aplikasi umum atau dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan beberapa syarat. Seperti melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis. Selain itu juga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Kominfo," jelasnya.

Berdasarkan survei Kementerian Kominfo pada tahun 2018, lanjut Bambang, terdapat 2.700 pusat data di 630 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Artinya rata-rata terdapat 4 pusat data pada setiap instansi pemerintah. Sedangkan secara nasional utilisasi pusat data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah menawarkan SICANTIK Cloud sebagai solusi dalam penerapan aplikasi umum dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pemerintah. "SICANTIK Cloud dapat digunakan untuk melayani proses perizinan dan non-perizinan, baik di PTSP instansi pemerintah pusat maupun daerah," ujar Direktur Bambang.

# UNIT KERJA LAYANAN KOMINFO RAHAI PENGHARGAAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Unit Kerja Layanan Perizinan Utama berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Direktorat Operasi Sumber Daya menjadi unit kerja kementerian pertama yang berhasil memperoleh penghargaan predikat WBK. Penghargaan berhasil diraih setelah dilakukan serangkaian perbaikan pada bisnis proses perizinan dan budaya anti korupsi di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya.

Direktur Jenderal SDPP Kementerian Komunikasi dan Informatika mengapresiasi kepada Direktur Operasi Sumber Daya, Dwi Handoko, atas keberhasilannya memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Direktorat Operasi Sumber Daya merupakan satuan kerja (satker) di bawah Ditjen SDPP yang bertugas mengelola pelayanan publik terkait Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR). Jumlah perizinan yang ditangani berkisar 450.000 izin Stasiun Radio (ISR) dan 10.000 Sertifikat Operator Radio (SOR), dengan rata-rata perolehan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) per tahunnya mencapai Rp 16 Triliun.

Direktorat Operasi Sumber Daya ditunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu pilot project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik antara lain:

- Peningkatan Inovasi Pelayanan
- Pembayaran BHP SFR secara Host to Host: Tahun 2012
- E-licensing: Tahun 2014
- Tanda tangan digital pada ISR: Tahun 2017
- Pelayanan Perizinan ISR dan SOR Satu Hari (One Day Service): Tahun 2018
- Ujian Negara Sertifikat Operator Radio berbasis computer (CAT): Tahun 2018
- Sertifikat Operator Radio Elektronik (e-IAR): Tahun 2019
- Program yang menyentuh masyarakat
- Sosialisasi perizinan ISR dan budaya anti korupsi: Webinar, Tapap Muka, Medsos, Expo, Pameran Pembangunan
- Perizinan Jemput Bola untuk nelayan: Maritim on the Spot dilaksanakan di Pelabuhan untuk memfasilitasi Nelayan mengurus izin Stasiun Radio Maritim dan Sertifikasi Operator Radio
- Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap tahun untuk penggunaan layanan
- Peningkatan Peran 35 UPT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan sosialisasi publik di daerah

Proses evaluasi penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang terdiri dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kominfo, oleh Kementerian PAN-RB, serta melalui survei terhadap masyarakat pengguna jasa layanan publik Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPP. Dirjen Ismail juga berpesan agar Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPP dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai, agar penganugerahan ini juga dapat menjadi motivasi bagi semua satker yang mengelola pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPP khususnya dan Kementerian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan budaya anti korupsi dalam birokrasi dan pelayanan publik.



Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima enam penghargaan dari TOP DIGITAL Awards 2019. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menerima penghargaan semantara Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Sekretariat Jenderal mendapatkan dua penghargaan.

BAKTI meraih penghargaan dalam kategori TOP DIGITAL Implementation 2019 on Ministry, Level 4, TOP Digital Transformation Readiness Star 4, TOP Leader on Digital Implementation 2019, TOP Director Utama BAKTI Kominfo, 2019 untuk Direktur Latif, dan TOP CIO on Digital Implementation 2019 untuk Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo. Fadhilah Mather,

Sementara PDSI meraih penghargaan dalam kategori TOP DIGITAL Implementation 2019 on Ministry, Level Star 4 dan TOP Digital Transformation Readiness 2019. Direktur Keuangan BAKTI Kominfo, Ahmad Jauhari berharap bahwa penghargaan yang diterima dapat memotivasi BAKTI untuk menjadi lebih baik. "Kita memperoleh penghargaan dari IT Works, ada empat kategori," kata Ahmad saat diterima usai menerima penghargaan untuk BAKTI di Golden Ballroom, Hotel Sultana, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Ahmad Jauhari menambahkan BAKTI akan terus berupaya untuk membangun infrastruktur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). "BAKTI terus melakukan suatu koordinasi maksimal untuk membangun infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah-daerah 3T," tegasnya.

## Tingkatkan Layanan Publik

Ketua Penyelenggara TOP Digital Awards 2019 Lutfi Handayani berharap bahwa penghargaan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah.

"Instansi pemerintahan kita makin cepat dan berkualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat," kata Lutfi dalam sambutannya. Lutfi menambahkan bahwa kegiatan TOP DIGITAL Awards 2019 merupakan kegiatan rating atau award tahunan yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada korporasi dan instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan solusi digital.

Lutfi berharap bahwa investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun infrastruktur TI di masing-masing instansi dapat memberikan manfaat yang maksimal.

"Kami berharap investasi yang tidak sedikit dalam bidang IT membawa hasil dan manfaat bagi instansi dan korporasinya," ujarnya.

Acara puncak kegiatan TOP DIGITAL Awards 2019 ini dihadiri oleh pimpinan Kementerian dan lembaga, gubernur, walikota, bupati, CEO serta IT Manager yang menerima penghargaan.

## 6 KATEGORI ANUGERAH

Bersama dengan 10 perwakilan Kementerian lain, Kementerian Kominfo memperoleh kualifikasi. Informasi pada Kategori Badan Publik Kementerian. Kualifikasi itu diberikan berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

Selain diberikan kepada Badan Publik Kementerian, penghargaan juga diberikan kepada 6 kategori lainnya, yaitu kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan, kategori Non-Kementerian, kategori Badan Publik Lembaga Non-Struktural, kategori Badan Publik Pemerintahan Provinsi, kategori Badan Publik Usaha Milik Negara, kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri, dan kategori Badan Publik Partai Politik.

Acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 ini dihadiri pula oleh perwakilan Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan partai politik.

Wapres mengungkap pengakuan dunia internasional atas prestasi Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka. Salah satunya Indonesia dipercaya menjadi Steering Committee dalam Forum Open Government Partnership (OGP) periode 2019-2022. "Sebuah kepercayaan sekaligus menjadi penghargaan dunia atas partisipasi Indonesia dalam menciptakan praktik-praktik pemerintahan yang diandasi keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik," jelasnya.

Ke depan, Wapres Ma'ruf Amin berharap agar Komisi Informasi yang bertugas melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat bekerja dengan cerdas dan inovatif untuk meningkatkan keputusan badan publik dalam keterbukaan informasi.



# KOMINFO TERIMA ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK 2019



Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif, Didampingi Menteri Kominfo Johnny Plate dan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widastuti.

Wapres Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada badan publik yang telah berhasil mendapatkan penghargaan dengan memenuhi kualifikasi Cukrup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif. Dalam sambutan, Wapres juga mengingatkan arti penting keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah.

"Memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban dari badan publik. Keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan kan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

Selain itu, Wapres mengharapkan agar badan publik juga meningkatkan kualitas konten informatif yang disajikan kepada masyarakat. "Saya minta agar badan publik tidak sekadar memberikan akses informasi saja, namun juga meningkatkan kualitas konten yang disampaikan kepada masyarakat. Tantangan ke depan tidak terbatas pada akses informasi, namun pada konten informasi yang harus ditingkatkan kualitasnya," tegasnya.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, keakuratan informasi yang diberikan merupakan hal yang penting karena badan publik harus menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. "Badan publik juga tanggap dalam menerima aspirasi dari masyarakat sehingga tidak hanya memberikan informasi secara satu arah," tambahnya.

# INFRASTRUKTUR ICT WUJUDKAN MISI MENUJU NEGARA DIGITAL

Jakarta, Kominfo – Ekosistem digital di Indonesia berkembang cukup baik. Hal tersebut terbukti dengan kehadiran ratusan startup digital yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan, pembangunan infrastruktur digital harus terus berlanjut. Itu dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara digital di dunia.

“Satu kenyataan bahwa dunia ini bergeser dari dunia fisik ke dunia maya, akan juga bergeser dari fisik teritorial negara masuk ke negara digital. Indonesia dalam hal ini, tentu suatu keniscayaan untuk harus mempunyai visi masa depan yang bergeser menjadi negara digital,” kata Menteri Johnny dalam Program Economic Challenge di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Saat ini, Kementerian Kominfo menyiapkan infrastruktur digital Palapa Ring. Saat ini, kata Menteri Johnny, Palapa Ring yang telah dibangun juga didukung dengan hadirnya Base Transceiver Station (BTS), khususnya di daerah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan)

“Selama ini sudah diketahui oleh publik infrastruktur yang sudah dibangun yang disebut dengan backbone Palapa Ring. Palapa Ring adalah gelar fiber optik di darat dan di laut. Kemudian, masih ada blank spot di wilayah 3T yang perlu dibangun, yakni BTS dari darat ke udara, jelas Menteri Johnny.

Tidak hanya Palapa Ring dan BTS, Menteri Kominfo memaparkan bahwa pemerintah juga menyoal apakah sateelit atau yang disebut ‘tai langit’ yang dihubungkan dari udara ke darat.

“Nah, ini semuanya kalau dibangun maka tersebutlah infrastruktur digital yang merata secara nasional. Kalau itu semuanya dibangun, maka kita semuanya mempunyai kecepatan internet sampai 10MB per second, ‘tuturnya

Bahkan, menurut Menteri Kominfo, Indonesia justru membutuhkan tiga sateelit tambahan.” Kalau kita mau menjadi negara digital, maka setidaknya kita membutuhkan tiga sateelit lagi tambahan, delapan ribu lagi fiber optik untuk menjangkau wilayah 3T. Kalau itu dapat dilaksanakan sampai tahun 2035, maka saat itu kecepatan internet Indonesia sampai dengan 30MB per second, ‘pungkasnya.





# INDONESIA SUKSES PERTAHANKAN 3 SLOT ORBIT SATELIT



Dalam peringatan ulangtahun medcom.id itu, Menteri Johnny menyatakan Indonesia juga membutuhkan digital dan telekomunikasi talenta yang lebih banyak. Menurut Menteri Kominfo diproyeksikan pada tahun 2030 sampai 2035, Indonesia setidaknya membutuhkan lebih dari 100 juta digital talent.

"Tetapi untuk mendapatkan lebih dari 100 juta itu susahhnya minta ampun, ada potensi kekurangan digital yang jumlahnya juga jutaan," imbuhnya. Menteri Johnny, menegaskan perlunya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan untuk menghasilkan talenta digital. "Untuk itu, saya mengajak seluruh stakeholder dan ekosistem kita untuk bersama-sama membantu menghasilkan digital talent di Indonesia dalam jumlah yang memadai, kualifikasi yang memadai, sehingga bisa mengisi kebutuhan kita," tutup Johnny

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kebanggaan atas keberhasilan Indonesia mempertahankan tiga slot orbit satelit. Upaya itu berlangsung dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di El-Sheikh, Kairo, Mesir.

Saat ini, menurut Menteri Johnny, Indonesia telah menggunakan lima slot orbit satelit telekomunikasi. Dan mendatang, Indonesia akan memiliki tiga lagi satelit multifungsi. "Dari hasil pertemuan ITU di Kairo, kita sudah berhasil untuk tetap mempertahankan tiga slot orbit untuk satelit," kata Menteri Kominfo Johnny di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Jumat (6/12/2019) kemarin.

Dengan mempertahankan tiga slot orbit satelit tersebut, maka infrastruktur digital di Indonesia akan disediakan secara besar-besaran. "Kita harus bisa menggunakan, memanfaatkan semua itu dengan baik, secara cerdas, dengan cepat untuk kepentingan kemajuan masyarakat dan bangsa kita," ujarnya. Disamping mempersiapkan seluruh ekosistem telekomunikasi, Menteri Kominfo Johnny juga mengajak masyarakat dan pelaku industri di bidang telekomunikasi, untuk memanfaatkan ya dengan baik.



\* data berdasarkan page view website kominfo.go.id per 11 Desember 2019

# 5 HOAKS TERPOPULER 2019



Galeri Pemenang Undian Lazada

Lolongan Histeris Siska Kubur Alexander



Jokowi Mendapat Gelar dari Raja Salman yaitu Amrui Kazzab



Bunga Mahameru di Himalaya yang Bisa Dilihat Setiap 400 Tahun Sekali



Susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi Ma'ruf



Terpopuler



## 9 Rekrutmen PLN Tingkat SMA/SMK Sampai 15 Desember 2019

Penjelasan : Beredar sebuah selebaran rekrutmen PLN untuk SMA/SMK dan S1 pendaftaran akan dibuka tanggal 2 Desember sampai 15 Desember 2019.

Faktanya manajer komunikasi PLN UIW Sumatera Utara Rudi Artono, mengatakan saat ini tidak ada rekrutmen resmi yang dibuka PLN. Beliau menghimbau masyarakat agar berhati-hati jika melihat informasi agar terhindar dari penipuan. Lowongan yang asli hanya dimuat di website resmi PLN yakni rekrutmen.pln.co.id.



## 10 Tidur Dengan Kondisi Rambut Basah Bikin Flu

Beredar kabar di media sosial bahwa tidur dengan kondisi rambut basah bisa menyebabkan flu atau pilek.

Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip dari liputan6.com, Dr William Schaffner, Profesor Kesehatan di Division of Infectious Disease di Vanderbilt University Medical Center mengungkapkan bahwa pendapat itu telah lama dibantah. Penyebab utama flu atau pilek adalah virus, bukan kondisi rambut basah. Hal serupa juga dikatakan oleh Trichologist Dominic Burg bahwa menjadi sakit atau terkena flu adalah akibat paparan virus dan infeksi.



## 5 Promo Akhir Tahun Taman Safari Gratis Tiket Khusus Pengendara Motor

Beredar sebuah postingan berisi selebaran promo akhir tahun taman safari gratis tiket khusus pengendara motor untuk tanggal 30 Desember - 5 Januari 2019.

Faktanya setelah ditelusuri informasi tersebut adalah hoaks. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Kepala Humas Taman Safari Indonesia Yulius Supriharjo yang mengatakan pihaknya tidak mengeluarkan program gratis masuk bagi pengguna kendaraan bermotor (roda dua).

## 6 BPOM Sekarang Mahal

Beredar di media sosial melalui Twitter sebuah akun tentang izin BPOM sekarang mahal pertama naik jadi 5k.

Faktanya setelah ditelusuri Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny Lukito membantah biaya perizinan BPOM tergolong mahal. Menurutnya, itu hanya terjadi di masa lalu. Proses pembuatan izin edar suatu produk baik makanan dan obat-obatan saat ini sudah lebih mudah sejak menggunakan sistem daring (online). Menurut Penny, pendaftaran izin melalui daring itu dapat secara langsung dilakukan di balai-balai POM di tiap daerah di Indonesia.

## 7 Pengumuman Penerimaan Anggota Satpol PP Pemerintah Kabupaten Sintang

Beredar di media sosial sebuah pengumuman lowongan pekerjaan tenaga Bantuan Polisi (Banpol PP) Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020. Dalam pengumuman tersebut berisi poin-poin persyaratan yang harus dimiliki. Dalam surat lowongan tersebut juga terdapat dua logo resmi di atasnya.

Martin Nandung, Kepala Satpol PP dan Damkar menegaskan pengumuman tersebut tidak benar. Satpol PP juga tidak mengeluarkan surat pengumuman rekrutmen seleksi Banpol Pamong Praja. Martin menjelaskan sampai sejauh ini, pihaknya belum ada membuka seleksi penerimaan anggota Satpol PP. Ia menduga, pengumuman tersebut dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan.

## 8 Informasi Kupon Gratis Mengatasnamakan Transmart Carrefour

Telah beredar sebuah unggahan website yang menginformasikan adanya pembagian kupon gratis mengatasnamakan Transmart Carrefour. Dalam unggahan itu dituliskan, pembagian kupon gratis senilai Rp. 3.000.000,00 tersebut dalam rangka perayaan ulang tahun Carrefour.

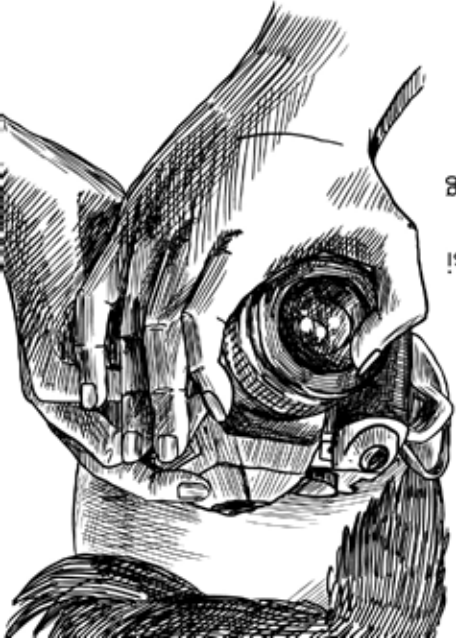
Menanggapi informasi tersebut, Transmart Carrefour melalui akun Twitternya @Transmart\_ID mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Pihak Transmart menegaskan, segala informasi dalam unggahan website tersebut tidak berkaitan dengan Transmart Carrefour.

### 3 DPO Mr X Pelaku Persekusi Banser NU di Pondok Pinang Jaksel



Beredar informasi! selebaran di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa "Mr X pelaku persekusi Banser NU menjadi daftar pencarian orang (DPO) kejadian 10 Desember 2019 Jam 15.00 WIB, di Pondok Pinang, Jaksel".

Faktanya, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa Polda Metro atau Polres Jakarta Selatan belum pernah mengeluarkan (informasi) DPO karena (kasus) ini masih disidik, dan selebaran itu Hoaks. selain itu, Yusri menegaskan bahwa kasus persekusi sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan dan belum ada penetapan tersangka.



### 4 Surat Mengatasnamakan BKN Perihal Penuguman Pegawai



Beredar surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara perihal penuguman penetapan nomor induk pegawai. Pada surat tersebut tertulis bahwa BKN menetapkan Nomor Induk Pegawai atas nama seseorang berdasarakan hasil uji kompetensi.

Faktanya BKN melalui akun Twitter dan Instagram resminya memberikan klarifikasi bahwa surat tersebut bukan produk BKN alias surat palsu. BKN berpesan agar jangan mudah percaya oleh siapapun yang mengaku orang dalam dan bisa membantu dalam proses rekrutmen CPNS.





mengatakan pengembangan kapasitas SDM di daerah 3T sangat dibutuhkan baik untuk ASN maupun masyarakat umum.

"ASN merupakan garda depan dan harapan bagi masyarakat di daerah 3T agar dapat memandu masyarakat disana menjadi lebih baik, terlebih lagi di daerah 3T masih diharapkan perhatian yang lebih banyak," katanya dalam pembukaan Pelatihan Teknis bagi Pegawai Humas di Pusat Diklat Kementerian Kominfo, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

### Tanggapi Masalah TVRI, Menkominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengharapkan polemik yang berlangsung di Televisi Republik Indonesia (TVRI) dapat diselesaikan secara arif. Hal itu disampaikan Menkominfo saat memberikan keterangan pers menanggapi polemik berkaitan dengan surat pemberhentian Direktur Utama Helmi Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI.

"Kepada Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas), saya tentu berharap atas nama pemerintah, masalah manajemen TVRI diselesaikan secara internal di dalam lingkungan TVRI," kata Menteri Johnny di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

### Menkominfo: Infrastruktur Digital Perkecil Disparitas Sosial

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu tujuan percepatan pembangunan itu untuk memperkecil disparitas atau perbedaan pembangunan antara daerah satu dengan yang lain.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate optimis melalui masifnya pembangunan infrastruktur digital, Indonesia akan bertransformasi dari dunia fisik menuju dunia digital. "Kita membutuhkan untuk akselerasi pembangunan yang berkeadilan dan merata, untuk memperkecil disparitas," kata Menteri Johnny dalam acara Meeting of Minds oleh Haritage Amanah Indonesia di Pelataran Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (10/12/2019) malam.

### Sekjen Kominfo: PNS Harus Jadi Motor Penggerak Perubahan

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiajuti menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) harus menjadi motor penggerak perubahan. Menurutnya, saat ini PNS memiliki tantangan baru dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

"Semua tugas yang dilakukan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Maka dari itu, tanamkanlah kesadaran dalam diri masing-masing bahwa Anda adalah bagian penting dari motor penggerak perubahan yang lebih baik," ujarnya dalam acara Pengambilan sumpah dan janji PNS formasi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2019 di Ruang Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

### Siap Gelar MOTS 2020, Kominfo Turunkan Tim dari 22 UPT

Setelah menuntaskan delapan pilot project pelaksanaan Maritim on the Spot (MOTS) sepanjang 2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPP) kembali akan menyusur 22 pelabuhan di 2020. Diharapkan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan MOTS dapat belajar dari pengalaman UPT yang sudah menjalankannya tahun ini.

"Teman-teman bisa langsung menyesuaikan, tidak lagi harus dimulai dari awal yang sama dengan teman-teman UPT yang sudah memiliki pengalaman," kata Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko pada sambutan pembukaan Sosialisasi Persiapan Perizinan MOTS Tahun 2020, Jumat (29/11/2019) di Solo.

### Menkominfo: Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Last Mile

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia terutama infrastruktur last mile berupa fiber optik. "Masih ribuan kilometer fiber optik yang harus kita bangun," kata Menteri Johnny dalam Forum Pimred: Diskusi Bengong Bang Johnny di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Menteri Kominfo menceritakan pemerintah selama 5 tahun terakhir telah bekerja keras dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dan digital. Ketersediaan infrastruktur tersebut penting karena saat ini sedang terjadi transformasi di segala bidang dari dunia fisik ke digital. "Kita bertransformasi, bermigrasi menuju bangsa digital ini, perlu kerja yang luar biasa dari kita sekalian," ujar Johnny.

### Aryo Pamoragung, ASN Kategori The Future Leader

Melalui kontribusinya dalam melakukan reforming (penataan ulang) frekuensi seluler, Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Aryo Pamoragung masuk sebagai tiga terbaik untuk kategori The Future Leader Anugerah ASN 2019 yang disiarkan secara langsung dari Auditorium TVRI Jakarta, Senin (02/12/2019) malam.

Inovasi yang digagas Aryo diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan pita frekuensi radio. "Melalui reforming masyarakat di daerah perkotaan akan menikmati penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan traffic data yang mengalami kepadatan jaringan (network congestion), sedangkan bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar perkotaan, bisa menikmati layanan 4G," ungkap Aryo.

### Sekjen Kominfo Apresiasi Dukungan Uni Eropa untuk Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiasuti mengapresiasi atas komitmen dan dukungan Uni Eropa dalam kerja sama di bidang digital selama ini, khususnya berkaitan dengan pelindungan data pribadi.

"Saya mengapresiasi atas komitmen Uni Eropa dalam kerja sama antara Kementerian Kominfo dengan Komisi Uni Eropa. Pertama dukungan pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi," ungkapnya dalam Pertemuan Bilateral dengan Delegasi Uni Eropa DG Connect, di Brussels, Belgia, Senin (02/12/2019). Menurut Sekjen Kominfo, selama penelitian dan best practices Data Protection Authority, seminar GDPR untuk sektor swasta dan publik, serta pelatihan dan sertifikasi Data Protection Officer.

### Kominfo Latih SDM ASN Papua Soal Teknis Kehumasan

Kementerian Komunikasi dan Informatika melatih Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Kehumasan yang bekerja di daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T). Pelatihan bertema Public Relations Junior Officer - Administrator - Staff itu diikuti oleh ASN dari Provinsi Papua. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Balitbang SDM Kementerian Kominfo, Usuluddin



# LINTAS

# KOMINFO

# DESEMBER 2019

## Indonesia Sukses Pertahankan 3 Slot Orbit Satelit

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kebanggaan atas keberhasilan Indonesia mempertahankan tiga slot orbit satelit. Upaya itu berlangsung dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di El-Sheikh, Kairo, Mesir.

Saat ini, menurut Menteri Johnny, Indonesia telah menggunakan lima slot orbit satelit telekomunikasi. Dan mendatang, Indonesia akan memiliki tiga lagi satelit multifungsi. "Dari hasil pertemuan ITU di Kairo, kita sudah berhasil untuk tetap mempertahankan tiga slot orbit untuk satelit," kata Menteri Kominfo Johnny di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Jumat (6/12/2019) kemarin. Dengan mempertahankan tiga slot orbit satelit tersebut, maka infrastruktur digital di Indonesia akan disediakan secara besar-besaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate optimistis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera rampung pada 2020. Johnny mengatakan bahwa saat ini Kominfo bersama DPR terus membahasnya secara intensif.

"Tahun 2020 mendatang Indonesia sudah harus memiliki undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)," ujar Menteri Johnny dalam "Forum Permed" di Jakarta, Senin (9/12/2019). Regulasi itu dinilai penting karena berkaitan dengan kedaulatan data. Menteri Johnny menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan segera regulasi yang berkaitan dengan kedaulatan data. Hal itu selaras dengan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dan digital secara masif.

## 4 Kota Ini Jadi Lokasinya Integrated Data Center Slop Dibangun

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana membangun Integrated Data Center di Indonesia. Ada empat daerah yang akan dijadikan lokasi pembangunan pusat integrasi data itu.

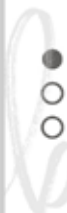
Keempat daerah tersebut antara lain Batam, Bekasi, Manado dan Ibu kota Negara yang baru di Kalimantan Timur yakni, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. "Kita awali dari terintegrasinya data-data pemerintah yang dibawah kendali pemerintah," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate di Kementerian Kominfo, di Jakarta, Jumat (06/12/2019).

## Kurang! Drop Call Ponsel Illegal Agar Konsumen Tak Rugi

Penggunaan telepon seluler (ponsel) ilegal merugikan semua pihak, baik konsumen maupun produsen. Terutama bila terjadi drop call atau gangguan saat komunikasi berlangsung, selain pengguna terganggu, kualitas layanan operator seluler juga jadi menurun.

"Drop call berpengaruh pada turunnya kualitas layanan operator. Hal itu merugikan, karena operator harus menambah BTS, antena, dan lain lain," kata Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mochamad Hadiyono saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Hukum Bidang SDPI di Batam, Selasa (3/12/2019).





Ke depannya, pada tahun 2020 kita akan menambah 2 academy baru pada program ini yaitu thematic academy dan regional development academy, semoga ini bisa meningkatkan deliverability dari program DTS ini.

Selain itu, pada tahun ini Digital Talent Scholarship kembali dilaksanakan dengan target melatih skill up kompetensi alumni SMK, Diploma dan SI bidang IT maupun MIPA agar bisa bersaing dan mengikuti perkembangan Revolusi Industri 4.0. "Saya merasa masih banyak yang perlu kita tingkatkan, agar program ini betul-betul delivered seperti arahan dari Presiden Jokowi. Secara kuantitas, target 25 ribu tercapai namun secara kualitas program ini masih bisa kita tingkatkan dengan dukungan seluruh mitra Perguruan Tinggi, global technology companies, dan stakeholder lainnya," jelas Hedi.

Secara target, tahun 2019 sekitar 15.000 orang alumni SMK dan program Diploma (vokasi) sudah difasilitasi Balitbang SDM Kominfo untuk mendapatkan Sertifikat SKKNI melalui Bimbingan teknis, pelatihan dan sertifikasi. Hasilnya, pada tahun ini sudah lebih dari 70 persen peserta yang mengikuti SKKNI telah dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP.

### Evaluasi Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Balitbang SDM



Menurutnya hal ini sangat penting karena akan terjadi transformasi di dunia penyiaran yang sangat signifikan begitu Revisi UU Penyiaran disahkan. "Namanya UU Penyiaran, tapi dampaknya akan memberikan *multipplier effect* ke spektrum, bagi publik, dan juga efisiensi di penyiaran itu sendiri. Sistem penyiaran TV yang sudah ada ini menggunakan analog dengan pemborosan spektrum frekuensi yang sangat besar. Kalau bergerak ke digital, selain kualitas TV dan interaktifnya menjadi bagus, di sisi lain akan memberikan insentif dalam bentuk *digital dividend*, yaitu sisa frekuensi yang bisa digunakan. Untuk PDR (Public Protection and Disaster Relief), pendidikan, layanan kebencanaan," jelas Dirjen Ramli.

Ditjen PPI juga akan memfasilitasi layanan telekomunikasi di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Sumatera Utara; Borobudur, Jawa Tengah; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; dan Likupang, Sulawesi Utara.

"Ini sebenarnya lebih banyak di operator, kita telah kumpulkan seluruh direksi. Saya juga sudah turunkan tim Pengendalian untuk *driving test*,

## Ahmad M. Ramli

Direktur Jenderal  
Pos dan Informatika

mengukur di daerah-daerah itu berapa kecepatannya. Dari hasil pengukuran itu kita bisa tahu daerah blankspot-nya ada di mana. Mungkin kalau Borobudur Danau Toba coverage-nya sudah bagus, tapi Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, karena itu mendekati (wilayah) terluar, itu yang harus kita siapkan," papar Dirjen Ramli.

Terakhir, Ditjen PPI akan menyiapkan perencanaan infrastruktur di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. "Tahun ini kami sudah mulai kaji, berapa luas wilayahnya. Kalau pengembangan pertama 4Orbu hektar dengan penduduk diperkirakan sekitar 2 juta, kita sudah bisa hitung. berapa BTS yang harus disediakan. Di sana kan akan kelihatannya disetting lebih ke apartemen, sehingga tower akan makin minimal karena kita bisa pasang BTS di gedung-gedung tinggi. Itu akan lebih simpel. Saya mengajar operator, ingin mereka juga punya plan yang bagus untuk masuk ke ibukota baru," tutup Dirjen Ramli.

*Indo*



Menurut data Ditjen PPI, dari total 44.651 km2 luas permukiman di Indonesia, coverage layanan seluler telekomunikasi di Indonesia untuk 2G telah mencakup 99,19%, lalu 96,30% untuk jaringan 3G, serta sebesar 97,59% jaringan 4G telah mencakup wilayah permukiman Indonesia.

Hal lain yang turut dievaluasi Ditjen PPI adalah tarif telekomunikasi. Menurut Dirjen Ramli, tarif telekomunikasi Indonesia termasuk yang termurah di antara negara-negara di ASEAN. "Populasi rakyat kita yang setidaknya sampai 200 juta justru menjadi penggerak ekonomi digital dan bergerak industri telekomunikasi. Tapi Ditjen PPI juga mengawal jangan sampai perang harga. Kalau perang tarif, jadi tidak sehat. Industrinya berdarah-darah, revenue-nya juga akan kocar-kacir tapi tidak memberi ukuran yang baik untuk pertumbuhan," jelas Dirjen Ramli.

**Terus Dorong Peningkatan Layanan Publik**

Selama tahun 2019, Dirjen Ramli juga terus mendorong Ditjen PPI mendapatkan Sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) demi terciptanya layanan iklim usaha yang baik. "Seluruh direktorat yang ada layanan publiknya: telekomunikasi, pos, penyiaran: saya dorong untuk mendapatkan ISO dan memberikan layanan secara sistem online. Karena saya yakin kalau pakai standar internasional seperti ISO maka kita ini akan bekerja lebih sistemik dan baik," jelasnya.

Beberapa Sertifikasi ISO yang dimiliki Ditjen PPI adalah ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu Layanan Perizinan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, ISO 27001

## Target 2020: Revisi UU Penyiaran hingga Infrastruktur Ibukota Baru

Salah satu fokus utama Ditjen PPI di tahun 2020 adalah Revisi Undang-Undang Penyiaran. Menurut Dirjen Ramli, saat ini RUU Penyiaran telah ditetapkan sebagai prioritas di Prolegnas 2020, namun Ditjen PPI akan terus mendorong DPR untuk segera mengirimmkan nasaknya.

Informasi pada Layanan Perizinan Pos dan Telekomunikasi.

Capaian lainnya yang diraih Ditjen PPI di tahun ini adalah penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik untuk layanan Sistem Perizinan Online dan Pelayanan Prima Ditjen PPI Hebat Andal Berbasis Teknologi Informasi (SIPP DI HATI). "Kita sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Pernah mendapatkan penghargaan Layanan Terbaik Nasional. Top 99 layanan terbaik Layanan Ditjen PPI dengan nilai sangat baik dari Kementerian PAN-RB untuk layanan perizinan," kata Dirjen Ramli.

Penghargaan diberikan atas beberapa faktor, yaitu sistem perizinan yang telah 100% online sehingga memudahkan waktu hingga 80%. memiliki e-status sehingga transparan, quick response code sebagai validasi keabsahan dokumen secara realtime, menggunakan tanda tangan digital SIVION, digital beschikking, serta terintegrasi dengan Online Single Submission Nasional (OSS). Kemendagri juga menganugerahi Ditjen PPI penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik di Tahun 2019.

## KILAS BALIK DITJEN PPI: Capaian 2019 dan Fokus Kerja di 2020

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli menjabarkan kilas balik Direktorat Jenderal PPI selama setahun ke belakang. Hal pertama yang ia tekankan adalah tanggung jawab Ditjen PPI dalam menjamin ketersediaan akses telekomunikasi bagi publik dengan baik.

“Yang menjadi concern kita adalah menjamin keteraksesan dengan baik. Akses telekomunikasi ini ibarat oksigen. Ketika ada, orang tidak merasa perlu, tapi ketika tidak ada orang pasti merasakan sesuatu. Dampak industri telekomunikasi bagi publik pun luar biasa. Kalau kita bicara ekonomi digital, salah satu dari 4 variabel utamanya adalah akses telekomunikasi. Akan ada dampak yang sangat signifikan ketika layanan broadband ini naik, masyarakat ekonominya akan naik.”



Tugas lain yang terus dijalankan Ditjen PPI adalah memastikan layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat sesuai standar kualitas yang baik. “Kami monitor quality of service dan quality of experience. Operator boleh saja bilang kami sudah cover semua, tapi juga harus dipastikan bandwidth-nya mencukupi. Mengherankan kalau kita klaim sudah bisa meng-cover begitu luas wilayah tapi dengan kecepatan internet yang rendah. Gerakan ekonomi digitalnya kan jadi tidak optimal,” jelasnya.

# Semuel Abrijani Pangerapan

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

**Program Prioritas 2020**

Sedangkan terkait program 2020, prioritas pertama berada pada sisi fasilitasi dan kolaborasi penambahan startup digital yang aktif dengan bekerjasama dengan pengembangan startup di Indonesia untuk mewujudkan Gerakan Nasional 1000 startup digital. Kedua, sesuai dengan amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, penyediaan *government cloud* atau Data Center Nasional sebagai implementasi Satu Data Nasional dan sistem penghubung layanan pemerintahan.

Ketiga, melakukan peningkatan adopsi teknologi di sektor strategis diantaranya sektor pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi, kesehatan, perdagangan, dan pendidikan. Terakhir, Ditjen Aptika akan melakukan lanjutan pembahasan RUU PDP dengan DPR yang ditargetkan dapat disahkan di tahun 2020 dan di lingkungan internal, Ditjen Aptika akan mengadakan pengembangan SDM melalui Pelatihan Data Privacy Officer (DPO) dan Kesadaran Pelindungan Data.

## Kilas Balik Ditjen Aptika atas Capaian 2019 dan Rencana 2020



Of Things yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Dari sisi Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE), tahun 2019 Aptika telah mencapai 3 (tiga) PSrE yang telah lulus audit dan mendapatkan status pengakuan tersertifikasi, di antaranya PT Privy Identitas Digital, Perusahaan Umum Percectakan Lang Republik Indonesia dan PT Indonesia Digital Identity. Aptika juga memberikan pengakuan terdofor kepada 3 PSrE seperti BSSN, PT Solusi Net Internusa dan BPT. Aptika juga telah mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- Dari sisi layanan aplikasi
- menyelesaikan pemanfaatan dan
- penggunaan aplikasi perijinan SiCantik Cloud oleh Pemerintah Daerah sejumlah 109 Pemd. Selain itu, Aptika pun telah merampungkan evaluasi implementasi smart city tahap 1 dan 2 bagi 75 kota / kabupaten yg terpilih pada periode 2017-2018 serta pelaksanaan assessment pada 112 kota/kabupaten dalam rangka pemilihan 25 kota/kab pada periode 2019.

Sebagai penutup, dalam setahun terakhir Aptika telah menangani 201.315 laporan konten negatif yang terdiri dari pornografi, perjudian, terorisme, SARA, hoaks, dan lain-lain. Monitoring & evaluasi sistem pemblokiran konten negatif telah dilakukan di 14 Provinsi di Indonesia.

## Kilas Balik Capaian Ditjen Aptika 2019

Selama Tahun 2019, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) memiliki banyak capaian di antaranya terpenuhinya target 300.000 Petani dan Nelayan Go Online dengan jumlah 151.324 Petani (100,88%) dan 151.018 Nelayan Go Online (100,68%). Program ini bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusaha petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, dari sisi peningkatan ekonomi digital di masyarakat, Ditjen Aptika juga telah meng-online-kan 39.233 UMKM di 20 Kabupaten/Kota dan 120 Pasar Rakyat dalam rangka meningkatkan awareness pentingnya pemanfaatan TIK bagi UMKM.

Prestasi Aptika yang tak kalah penting adalah kesuksesan mencapai 379 tim technopreneur yang terdiri dari 171 Startup Weekend Indonesia, 177 Startup Digital dan 31 startup kerjasama dengan mitra dalam rangka mendorong aktivasi e-commerce di Indonesia.

Aptika juga berhasil melakukan literasi digital bagi masyarakat dengan total 36.235 peserta, dan menerbitkan 10 buku serta 3 video dengan berkolaborasi dengan 106 mitra strategis. Dalam hal fasilitasi pengembangan karya TIK anak bangsa, Aptika juga memiliki capaian 30 karya TIK dan 125 prototipe internet

## Ismail



*Ismail*

Sedangkan terkait program 2020, prioritas pertama berada pada sisi *capacity building* untuk menjadikan DITjen SDPPI terdapat dalam transformasi digital. Kedua, dalam hal penataan frekuensi, akan dilakukan lelang pita 2.3GHz. Selain itu juga akan dibuat *masterplan* radio digital dan konsep *Government Radio Network (GRN)* sebagai salah satu opsi jaringan komunikasi masa depan yang akan diterapkan di ibukota negara baru nanti. Ketiga, dalam hal program kolaborasi lintas kementerian, DITjen SDPPI juga memiliki kegiatan prioritas untuk

### Program Prioritas 2020

Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan pada tahun 2018, dan tahun ini Aryo Pamoragung, Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Setdijten SDPPI menjadi Tiga Terbaik dalam Anugerah ASN 2019 untuk kategori *The Future Leader*. Ini membuktikan bahwa DITjen SDPPI memiliki sumber daya manusia yang handal.

Terakhir, capaian Zona Integritas (ZI) & Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun ini akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam layanan perizinan *One Day Service* DITjen SDPPI saat ini. Selain itu DITjen SDPPI juga memperluas program *Maritime on The Spot* yang saat ini baru diselenggarakan di 8 lokasi, menjadi 20 lokasi di tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan SDPPI yang semakin mendekat kepada masyarakat, seiring dengan arahan utama Presiden dalam hal penyelenggaraan birokrasi.

menindaklanjuti kebijakan IMEI yang telah ditetapkan tahun ini, dimana saat ini kita akan membuat server *mirroring* SIBINA (Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional), sebagai tempat mengolah database IMEI. Harapannya dengan IMEI diharapkan kebijakan IMEI ini dapat akan menekan peredaran perangkat ilegal, menambah penerimaan negara dari sisi pajak, hingga mendorong industri dalam negeri.



## Kilas Balik Ditjen SDPPI atas Capaian 2019 dan Rencana 2020

### Kilas Balik Capaian Ditjen SDPPI 2019

Selama Tahun 2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) memiliki banyak capaian di antaranya terpenuhinya tambahan spektrum mobile broadband sebesar 350MHz, bahkan tercapai 546MHz dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas sebagai dasar hukum layanan Long Term Evolution (LTE) dengan License Assisted Access (LAA) termasuk beberapa teknologi lain seperti WiFi, RFID dan Internet of Things (IoT). Selain itu tahun ini SDPPI telah mengeluarkan kebijakan penting yang melibatkan 3 kementerian terkait International Mobile Equipment Identity (IMEI). Prestasi SDPPI yang tak kalah penting adalah kesuksesan Reforming pita frekuensi 900MHz yang selesai pada awal tahun 2019, pemberian izin perijinan pita seluler 2.1GHz untuk Telkomsel dan Indosat; dan pada bulan lalu Ditjen SDPPI berhasil dalam perijinan Sidang World Radiocommunication Conference (WRC-19) dalam perijinan *regulatory period* untuk 3 *filling* satelit Indonesia.

Dari sisi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga posisi medio Desember 2019 penerimaan PNBP telah melebihi target (118%) yang ditetapkan, yaitu 17,7 Triliun dari target 14,8 Triliun. Dalam hal perizinan, Ditjen SDPPI juga

telah menyelesaikan suatu tahap penting yaitu menyelesaikan pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dalam mendukung program OSS dengan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lebih dari 3,5 (sangat baik).

Dari sisi *broadcasting*, tahun 2019 SDPPI telah merampungkan *masterplan* TV Digital UHF melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency. Selain mendapatkan Anugerah Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2019 ini Ditjen SDPPI juga telah berhasil melaksanakan suatu ajang tempat mencurahkan ekspresi bagi seluruh insan Ditjen SDPPI, yaitu ajang *if:astest*. Tak kurang dari 400 karya yang dihasilkan dalam event tersebut. Mulai dari galeri foto, video profile, hingga inovasi program/metoda untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas organisasi, yang seluruhnya merupakan karya orisinal pegawai SDPPI. Sebagai penutup 2019, dalam dua tahun terakhir Ditjen SDPPI berhasil menempatkan wakilnya sebagai finalis Anugerah ASN yang diselenggarakan Kemendagri-RB. Yaitu Denny Setiawan, Direktur Penataan Sumber Daya, sebagai finalis 10 besar untuk kategori Pejabat



# Doddy Setiadi Inspektur Jenderal



Arah kebijakan pengawasan Inspektur Jenderal Tahun 2019 lebih memprioritaskan kegiatan yang mempunyai risiko terbesar, didasarkan pada evaluasi/penilaian risiko dan selaras dengan tujuan Audit Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), adanya direktif Menteri Komunikasi dan Informatika terkait perubahan kebijakan di bidang pengawasan internal, serta prioritas kebutuhan akan pengawasan yang harus dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengawalan akuntabilitas program kementerian dilakukan untuk memastikan pencapaian sasaran kegiatan prioritas kementerian dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini terutama ditujukan untuk kegiatan-kegiatan prioritas kementerian yang ada di setiap satuan kerja untuk meningkatkan sistem tata kelola guna mencapai target opini Laporan Keuangan Tanpa Pengecualian. Kegiatan pengawasan yang menonjol dalam rangka pengawalan akuntabilitas program kementerian yang dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal pada tahun 2015-2019 di antaranya adalah : (a) Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas UMKM Go Online; (b) Audit Kinerja Palapa Ring; (c) Evaluasi 350Hz; (d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pilot Project Fasilitas! Pengelaran Infrastruktur Fixed broadband dalam rangka Percepatan Penetrasi Fixed broadband Tahun 2018, serta (e) Evaluasi Capaian Sasaran Strategis Kementerian.

Pada tahun 2020, Inspektur Jenderal akan melakukan Pergeseran Mindset Pengawasan dari Kegiatan Eventual menjadi Continuous Monitoring (CACM). Hal ini menjadi penting agar harapannya program/kegiatan satker dapat dilaksanakan secara 3E (efektif, efisien, ekonomis). Berkembangnya konsep CACM dipicu oleh meningkatnya kompleksitas obyek pengawasan. Perkembangan ini akan menantang Inspektur Jenderal dari segi penguatan database dan kemampuan SDM. Ke depannya penggunaan IT menjadi hal yang tidak bisa dihindari, baik sebagai alat bantu analisis maupun sebagai basis big data.

## Arah Kebijakan Pengawasan Ijen dan Pergeseran Mindset Pengawasan



## Sekretariat Jenderal

Tidak ada capaian yang mudah didapatkan, terlebih tahun 2019 adalah tahun dimana evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 memasuki tahun terakhir dan menjadi landasan untuk perencanaan kinerja 5 tahun ke depan (2020-2024). Strategi yang disusun sebelumnya dalam Renstra 2015-2019 menjadi lebih teruji, apakah strategi tersebut efektif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Kominfo yang telah ditetapkan atau mengalami kendala dan memerlukan langkah lanjutan di 5 tahun mendatang. Salah satu hal yang patut dibanggakan adalah peran serta jajaran pegawai/pejabat dalam menyukseskan semua program kerja yang telah direncanakan.

Atas kinerja tahun 2019 terdapat berbagai penghargaan yang dicapai diantaranya adalah diraihnya status Wajar Tanpa Pengecualian atas Opini BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo untuk ke-3 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017. Selain itu, Pengelola JDIHN Kementerian Kominfo mampu meraih penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Harapan I Tahun 2019 Tingkat Kementerian. Pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Psa Data dan Sarana Informatika Kominfo meraih penghargaan dalam kategori TOP DIGITAL Implementation 2019 on Ministry, Level Star 4 dan TOP Digital Transformation Readiness 2019. Selain itu, pada tahun 2019 PPID Kementerian Kominfo juga menorehkan prestasi dengan mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Masih banyak capaian lain di tahun 2019 yang tidak lepas dari peran serta banyak pihak, termasuk pemanfaatan kepelembagaan; dimana sejuta kata tidak akan cukup untuk mengucapakan rasa syukur dan terima kasih.

Harapannya pada tahun 2020, Sekretariat Jenderal tetap mampu menjaga soliditas kinerja dengan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, integritas, serta menciptakan inovasi-inovasi yang dapat mendukung terciptanya good governance dan memacu pegawai untuk menjadi SDM Unggul sesuai dengan cita-cita Presiden sehingga Sekretariat Jenderal Kominfo dapat berbicara lebih lantang juga menorehkan prestasi lebih gemilang.



**ROSARITA NIKEN WIDIASUTI**  
Sekretaris Jenderal



# TABLE OF CONTENT

LIPUTAN  
UTAMA

40

STRATEGI  
KOMUNIKASI  
HINGGA PRESENSI  
MEDIA SOSIAL JADI  
SOROTAN

40

BELUM  
ADA  
JUDUL

46

MISS  
LAMBE  
HOAKS

17

PORTAL  
KOMINFO

22

TOK -  
TOK  
KOMINFO

28

SOROTAN  
MEDIA

32

SURAT  
DARI  
MMB9

01

EVALUASI  
KERJA

06

LINTAS  
KOMINFO

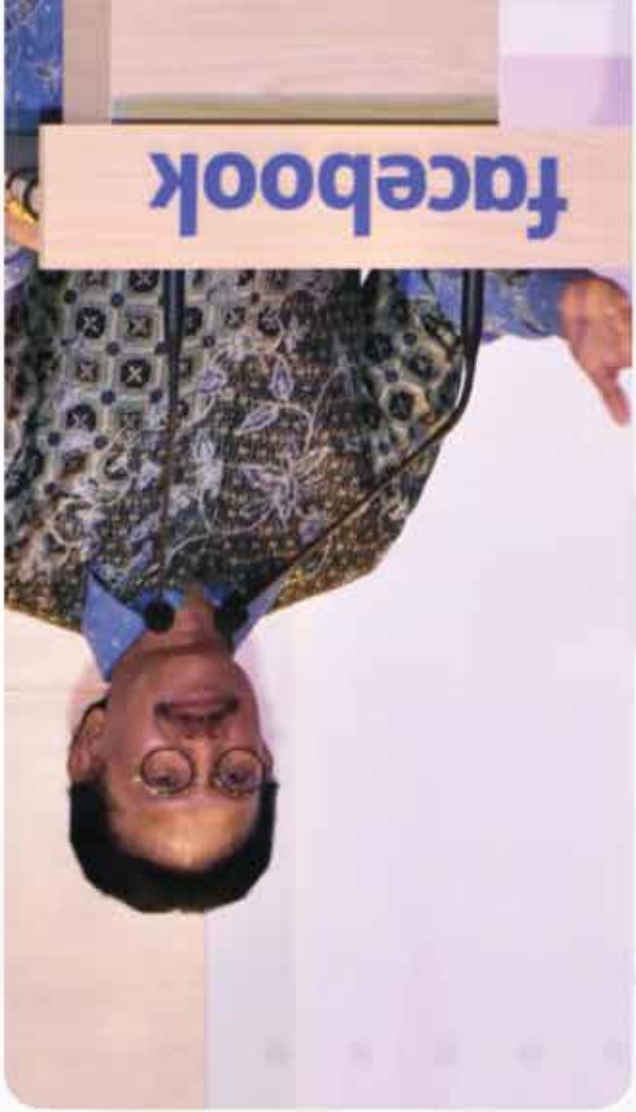
14



Kedasi kominfoNEXT menerima artikel dalam bentuk **opini, liputan, atau tulisan ringan** lainnya sesuai dengan rubrikas dalam kominfoNEXT. Naskah maksimal 2 halaman A4 spasi 15 dikirrimkan melalui

[majalahkominfoNEXT@kominfo.go.id](mailto:majalahkominfoNEXT@kominfo.go.id)

dengan subject: **Naskah Kominfo Next**. Bagi Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku di tahun berjalan



• TOP CIO on Digital Implementation 2019  
Fadhiah Mar...  
Direktur Sumber Daya dan In...



yang banyak beredar. Lebih dari 3.000 item hoaks yang berhasil diklarifikasi oleh Kementerian Kominfo di tahun 2019. Subdit Pengendalian Konten Internet di Ditjen Aptika termasuk yang paling sibuk di tahun ini dalam mengawal jagat maya kita tetap kondusif.

Peristiwa penting lainnya bagi Kemkominfo adalah peralihan jabatan Menteri dari Bapak Rudiantara ke Bapak Johnny G. Plate pada tanggal 23 Oktober 2019. Menteri Rudiantara sukses membantu Presiden Jokowi-JK selama 5 tahun dengan banyak capaian antara lain rampungnya Proyek Palapa Ring dan belasan program sukses lainnya.

Bicara soal waktu, orang Yunani memandang waktu dari 2 aspek: waktu sebagai Kronos waktu sebagai Kairos. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun dan sebagainya; baik sebagai waktu jangka pendek seperti sekejap mata maupun jangka panjang seperti puluhan tahun. Kronos dapat juga dimengerti sebagai deretan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam hidup manusia. Oleh sebab itulah kita sering mendengar kata kronologi. Kairos adalah waktu dalam arti waktu yang diberikan oleh Dia Sang Pencipta dan yang di dalamnya terdapat kesempatan bagi kita untuk bertindak penuh kasih atau melakukan sesuatu yang penting atau bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Kairos juga dapat menunjuk tindakan untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia.

@Fsetu @Fsetu @Fsetu Fsetu TV

Ferdinandus Setu  
Pjt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Di penghujung tahun 2019, mari kita merenungkan perjalanan hidup dan karya kita. Sudahkah kita mengisi waktu hidup kita, tidak hanya sebagai kronos, tapi lebih dari itu, kita menjadikan setiap waktu kita sebagai Kairos. Mari kita mempersiapkan 365 hari berikut di Kalender 2020 sebagai Kairos untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik di sektor komunikasi dan informatika. Oh ya, majalah Kominfo Next edisi ini dapat dibaca dari 2 cover: cover depan dengan topik Utama Survei Publik 2019, dan cover belakang dengan topik Kaleidoskop Kominfo 2019.

*Selamat Membaca*



# KALEIDOSKOP 2019

Satu kata yang paling mengemuka di akhir tahun

adalah Kaleidoskop. Mari kita buka KBBI. Kaleidoskop/  
ka.lei.dos.kop/ /kaleidoskop/ n 1 alat optik yang bentuk  
luarnya seperti keker, dilengkapi dengan dua kaca persegi  
panjang yang dipasang pada lapisan dalam pada salah  
satu ujungnya sehingga dapat memperlihatkan pelbagai  
gambaran yang indah dan simetris dari kepingan barang  
berwarna yang diletakkan di antaranya apabila dilihat  
dari ujung yang lain; 2 aneka peristiwa yang telah terjadi  
yang disajikan secara singkat. Tentu saja pengertian  
kedua yang kami tampilkan melalui Majalah Kominfo  
Next edisi Desember 2019 ini. Foto, infografis, liputan yang  
memperlihatkan program, kerja, agenda Kementerian  
Kominfo sejak bulan Januari hingga Desember 2019  
kami sajikan secara singkat melalui lembar-demi lembar  
Majalah Kominfo Next edisi ini.

Berbicara soal kaleidoskop berarti berbicara soal waktu

yang telah kita lewati bersama. Banyak peristiwa  
penting terjadi di tahun ini. Salah satu yang terbesar  
adalah Pemilihan Presiden. Pasangan Presiden Joko  
Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapatkan  
kepercayaan masyarakat Indonesia di angka 55,50  
persen. Kita ikuti seluruh prosesnya, dari penetapan calon,  
kampanye, debat, pencoblosan, penghitungan suara,  
rekapitulasi, sidang di Mahkamah Konstitusi, hingga  
akhirnya pelantikan Presiden dan Wakil oleh Majelis  
Permusyawaratan Rakyat. Seluruh proses itu kita ikuti  
dengan baik.

Kementerian Kominfo punya peran besar dalam seluruh  
rangkai proses Pilpres 2019, antara lain menyangkut dan  
memblokir konten hoaks, kabar bohong, informasi palsu

**Pengarah**  
Menteri Komunikasi  
dan Informatika RI

**Pembina**  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian  
Komunikasi dan  
Informatika RI

**Penganggung Jawab &  
Pemimpin Redaksi**  
Ferdinandus Setu

**Redaktur**  
Pelaksana  
M. Taufiq Hidayat

**Redaktur**  
Frans Bambang Irawan,

Daoni Diani Hutabarat,  
Verawati, Helmi Fajar  
Andrianto, Viskayanesyo

**Reporter**  
Patricia Somantha  
Silalahi, Annisa  
Bonita P., Yusuf,  
Tommy Tirtawiguna

**Fotografer**  
Agus Yudi Harsono,  
Doni Paulus Sumale,  
Sri Indrat Noviansari

**Desain & Layout**  
Adisto Winda Rizka,  
Rahma Aulia Indroputri,  
Lamdza Rahmatunnisa

**Produk & Sirkulasi**  
Fahmie Trihatin Januarisyah

Edisi 12  
Desember 2019



KOMINFO  
connect

# 2020

KOMINFO  
next

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

